

RENCANA KERJA TAHUNAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

GEDUNG GRAHA RUHUI RAHAYU JL. IR. H. JUANDA NO.81 KOTA SAMARINDA

2025

2018

2019

2020

202

\$255k

\$245k

\$167k



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh Swt, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan IKU dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2025 dapat dilaksanakan. Sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : SE/O5/M.PAN/3.2004 tanggal 17 Maret 2004 perihal Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Secara substantive Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perdagangan Kota Samarinda merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini mencakup perencanaan yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kota Samarinda yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kami memohon dengan harapan agar rencana yang telah dituangkan dapat diwujudkan dalam implementasinya.

Samarinda, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Perdagangan
Kota Samarinda



NURRAHMANI, S.IP, MM
NIP. 196903011990032003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	I
SURAT KEPUTUSAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
 INDIKATOR KINERJA UTAMA	 1
BAB I PENDAHULUAN	2
BAB II HASIL EVALUASI DAN REKOMENDASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024	6
BAB III TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2024	7
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024	13
BAB V INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025	20
a. Pohon Kinerja	20
b. Pengukuran Kinerja	21
c. Cascading / Penjenjangan Kinerja	27
d. Rencana Aksi	33
e. Rencana Aksi RB Tematik (Inflasi dan P3DN)	40
f. Croscutting Rencana Aksi	42
 BAB VI PENUTUP.....	 46

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Formulasi Indikator Dinas Perdagangan Tahun 2025.....	5
Tabel 3.1 IKU Dinas Perdagangan Tahun 2025.....	8
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Kunci Bidang Perdagangan tahun 2025.....	9
Tabel 3.3 Realisasi Retribusi Bidang Perdagangan Tahun Pertama Periode 2020 – 2024	10
Tabel 3.4 Rincian realisasi retribusi periode 2021 – 2024.....	11
Tabel 3.5 Target Retribusi Tahun 2025.....	11
Tabel 3.6 Rincian Target Retribusi Per pasar dan triwulan Tahun 2025.....	12
Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan tahun 2025...	13
Tabel 4.2 Review Indikator Kinerja terhadap RENSTRA dan RENJA 2025.....	16
Tabel 5.1 Pengukuran Kinerja Dinas Perdagangan tahun 2025.....	21
Tabel 5.2 Penjenjangan Kinerja Dinas Perdagangan tahun 2025.....	27
Tabel 5.3 Rencana Aksi Dinas Perdagangan Tahun 2025	34
Tabel 5.4 Rencana Aksi RB Tematik Dinas Perdagangan Tahun 2025.....	41
Tabel 5.5 Crosscutting Rencana Aksi Dinas Perdagangan Tahun 2025.....	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 5.1 Pohon Kinerja Dinas Perdagangan tahun 2025	20



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PERDAGANGAN

Gedung Graha Ruhui Rahayu Lt. 1 & 2, Jl.Ir. H. Juanda No. 81
Telp : 0541 – 742159, Fax : 748846 Kec.Samarinda Ulu
samarinda (kalimantan timur) Kode Pos 75124

laman : disdag.samarindakota.go.id

Pos-el : perdagangan.smd@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

NOMOR : 060.1/ 082 /SK/100.11

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

TAHUN 2025

- Menimbang** : a. Bahwa demi terarahnya pencapaian Sasaran Dinas Perdagangan Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Samarinda, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur capaian kinerja organisasi pada setiap tahun perencanaannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tahun 2021 - 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006: Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Wali kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
12. Peraturan Wali kota Samarinda Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini. |
| KEDUA | : | Indikator dan Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan yang menjadi bagian dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda untuk kurun waktu 2021-2026. |
| KETIGA | : | Setiap Bagian/Bidang yang ada di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Samarinda, dalam merencanakan program dan kegiatan wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan rencana kinerja tahunan tahun 2025. |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 31 Januari 2025

KEPALA,



NURRAHMANI, S.IP, MM
NIP. 19690301 199003 2 003

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda Nomor : 060.1/ 082 /SK/100.11 tentang Penetapan IKU dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan Tahun 2025.

Tanggal : 31 Januari 2025

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

Sasaran Daerah	Sasaran Strategis Dinas Perdagangan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi		Target	
			2022	2023	2024	2025
Meningkatnya pembangunan sektor tersier	Meningkatnya Produktifitas perdagangan dalam negeri	Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha	17,47 %	17,40%	17,45%	17,47%

Samarinda, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda


NURRAHMANI, S.P. MM
NIP. 19690301 199003 2 003

Lampiran II

Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda Nomor : 060.1/ 082 / SK /100.11 tentang Penetapan IKU dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan Tahun 2025.

Tanggal : 31 Januari 2025

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Perdagangan Kota Samarinda sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2025, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian Sasaran perangkat daerah, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda kepada Wali Kota.

b. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006: Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Wali kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
 12. Peraturan Wali kota Samarinda Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan
- 1) Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas, menyelenggarakan fungsi:
 - a) perumusan kebijakan daerah dibidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - b) pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - c) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaankebijakan dibidang pengembangan perdagangan dalam negeri,kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri; pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraandibidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologiandan pengembangan perdagangan luar negeri; pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - d) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Formulasi Indikator Dinas Perdagangan Tahun 2025

No	Indikator	Uraian Indikator	Satuan	Penjelasan	Formulasi	Rumus / Persamaan	Alasan	Sumber Data
1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan	Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha	%	Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dibagi PDRB Kota Samarinda	Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha	$+ \times 100$	RPJMD dan RENSTRA PD	BPS
1.1	Indikator Program Pertinaan dan Pendaftaran Perusahaan	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP/Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP/Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) dibagi Jumlah pelaku usaha (IUPP/SIUP/Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) dikali 100	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	$+ \times 100$		BP2TSP DISDAG
1.1.1	Indikator Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Presentase pertinaan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan Pengertian sesuai Permendag no.23 Tahun 2021	%	Jumlah rekomendasi pertinaan sarana perdagangan selain gudang yang diterbitkan ≤ 5 Hari Kerja dibagi jumlah permohonan pertinaan yang lengkap dan benar di kali 100	Jumlah izin (Rekomendasi) pusat Perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 Hari Kerja Jumlah Permohonan izin (Rekomendasi) pusat perbelanjaan yang dokumentasinya sudah lengkap dan benar Jumlah izin (Rekomendasi) pusat Toko Swalayan yang diterbitkan ≤ 5 Hari Kerja Jumlah Permohonan izin (Rekomendasi) Toko Swalayan yang dokumentasinya sudah lengkap dan benar	$+ \times 100$	Permendagri 18 Tahun 2020 (IKK)	DISDAG
1.1.2	Indikator Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Presentase TDG	%	Jumlah Rekomendasi Perizinan Gudang (TDG) yang diterbitkan ≤ 5 Hari Kerja dibagi Jumlah Permohonan Rekomendasi yang lengkap dan benar dikali 100	Jumlah penerbitan (Rekomendasi) TDG ≤ 5 Hari Kerja	$+ \times 100$		DISDAG
1.2	Indikator Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase Gudang yang Tidak Mempunyai TDG	%	Jumlah Gudang yang tidak memiliki TDG Dibagi Jumlah Gudang yang ada Di Kota Samarinda (131) dikali 100	Jumlah penerbitan TDG Jumlah gudang yang ada di kota samarinda	$+ \times 100$		DISDAG
1.3	Indikator Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	Presentase Pengembangan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	Pembangunan Sarana Distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0,5) ditambah Sarana distribusi (nilai 0,5) telah dimanfaatkan sesuai prurentukannya (nilai 0,5) dikali 100	$K=(a+b) \times 100\%$ a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0,5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai prurentukannya (nilai 0,5)	$+ \times 100$	Permendagri 18 Tahun 2020 (IKK)	DISDAG
1.3.1	Indikator Kegiatan Pengendalian Harga, Barang dan Stok Kebutuhan Pokok dan Penting	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	Nilai	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)		Kewenangan	BPS Pertanian, Distributor dan Kios Tani
1.3.2	Indikator Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase koefisien variasi harga barang antar waktu	%	Presentase koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Presentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	$+ \times 100$	Permendagri 18 Tahun 2020 (IKK)	BPS
1.4	Indikator Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Non Migas dan Non Batubara	\$	Total Nilai Ekspor menurut pelabuhan Samarinda dikurangi dengan nilai ekspor Migas dan Batubara	$X=a/b \times c \times 100$ a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasaan pupuk dan pestisida (KPP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) dikali c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	$\times 100$	Prioritas Provinsi Kaltim	Pertanian, Distributor dan Kios Tani
1.5	Indikator Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Presentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	%	Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku dibagi Jumlah Potensi Alat UTTP (10980)	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	$+ \times 100$		DISDAG
1.5.1	Indikator Kegiatan Pelaksanaan Menologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Presentase alat - alat UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun berjalan	%	Jumlah Alat UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun berjalan dibagi Jumlah Potensi Alat UTTP (10980)	Jumlah UTTP yang di Tera / Tera ulang pada tahun berjalan Jumlah Potensi UTTP yang wajib di tera dan tera ulang	$+ \times 100$	Permendagri 18 Tahun 2020 (IKK)	DISDAG
		Presentase kesesuaian BOKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	Jumlah Sampel BOKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dibagi Total sampel BOKT yang diawasi dalam tahun berjalan dikali 100	Jumlah Sampel BOKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku Total sampel BOKT yang diawasi dalam tahun berjalan	$+ \times 100$		DISDAG

II. HASIL EVALUASI DAN REKOMENDASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 didapati beberapa permasalahan yang akan ditindaklanjuti pada rencana kerja tahun 2025 diantara lain :

1. Penyesuaian target indikator kinerja dan rencana aksi dengan memperhatikan 3 tahun terakhir dan capaian RENSTRA sampai dengan tahun 2024 dengan juga memperhatikan tren realitas yang akan dihadapi pada tahun 2025
2. Efisiensi dan rasionalisasi terhadap anggaran promosi menggunakan media pameran
3. Peningkatan SDM Teknis dari segi Kualitas dan Kuantitas dengan mengikuti Bimbingan teknis
4. Pembangunan lanjutan pasar buah jl. Merdeka Kota Samarinda
5. Percepatan serah terima Bebaya Mart agar dapat segera di manfaatkan menjadi salah satu sarana distribusi di kota samarinda
6. Penyediaan biaya sewa tempat dampak mundurnya progress penyelesaian pembangunan pasar pagi oleh Dinas PUPR
7. Perbaikan penyusunan dokumen SAKIP Dinas Perdagangan
8. Peningkatan sarana prasarana terhadap pengelolaan sampah pasar segiri dampak peningkatan volume sampah
9. Tinjau ulang nomenklatur Dinas Perdagangan kota Samarinda dalam rangka penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan Periode Tahun 2025 – 2029.

III. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 2025

Tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah adalah penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Tahun 2021 – 2026, dimana Tahun 2025 merupakan Tahun ketiga dalam RENSTRA tersebut.

Tujuan strategis Dinas Perdagangan merupakan turunan dari Sasaran Strategis RPJMD Kota Samarinda yaitu :

“MENINGKATNYA PEMBANGUNAN SEKTOR TERSIER”

Indikator : Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB

Untuk mendukung Tujuan tersebut Dinas Perdagangan Menyusun Sasaran Strategis yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS PERDAGANGAN DALAM NEGERI

a. Indikator Kinerja Utama

IKU adalah singkatan dari Indikator Kinerja Utama, yaitu ukuran atau indikator kinerja suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD). IKU merupakan acuan kinerja yang digunakan OPD untuk berbagai hal, seperti: Menyusun Rencana Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Penetapan IKU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan untuk manajemen kinerja yang baik. Selain itu, IKU juga dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Dalam hal ini Dinas Perdagangan kota Samarinda Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan mendorong / mendukung Sasaran Daerah Kota Samarinda dengan Indikator :

“Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha”

Tabel 3.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

Sasaran Daerah		Indikator		Target 2025				
Meningkatnya pembangunan sektor tersier		Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB		8,30%				
Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan	Rumus / Persamaan	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Produktifitas perdagangan dalam negeri	Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha	%	Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dibagi PDRB Kota Samarinda	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha PDRB Kota Samarinda	Target RENSTRA	Target RENSTRA	Target RENSTRA	Target RENSTRA
					8.621.093,88	9.327.610,00		
				+	x100	=17,40%	17,45	Target 2025 17,47%
					49.342.390,41	53.604.330,00		

Melihat trend capaian realisasi dari 3 tahun terakhir dari Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dimana Kontribusi yang dihasilkan rata - rata 17,43% maka target IKU pada Matrik Revisi RENSTRA Dinas Perdagangan Tahun 2016 - 2021 perlu ditingkatkan dan menetapkan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2025 sebesar : 17,47%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Kota Samarinda	:	Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha
Target Tahun 2025	:	17,47% (Sumber data BPS)

Untuk selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan dan Perjanjian Kinerja

b. Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2021) Bidang Perdagangan Kabupaten / Kota.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. IKK merupakan instrumen yang wajib dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

IKK berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, sehingga target dan realisasi dapat dibandingkan dengan jelas.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Kunci
Bidang Perdagangan Tahun 2025

No	Indikator Outcome / Output	Target Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja				Penanggung jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
			K	K	K	K	
1	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	54,05	8,11	10,81	16,22	18,92	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
1.1	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan Sarana Perdagangan Selain Gudang	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Ketua Tim Kerja Pelaku Distribusi
1.2	Persentase Gudang Yang Tidak Memiliki TDG	59,54	0,00	0,00	0,00	59,54	
1.3	Persentase TDG	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
1.4	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	Kepala Bidang Sarana Perdagangan
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
2.1	Persentase jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	Ketua Tim Kerja Pengendalian Barang Pokok dan Penting
3	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu	<10	0,00	0,00	0,00	10,00	Ketua Tim Kerja Pengendalian Barang Pokok dan Penting
4	Persentase alat - alat UTPP bertanda tera sah yang berlaku	54,03	0,00	0,00	0,00	54,03	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
4.1	Persentase alat - alat UTPP yang ditera / tera ulang pada tahun berjalan	51,44	1,82	18,21	20,04	11,37	Kepala UPT Metrologi
4.2	Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017)	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	Ketua Tim Kerja Kemetrolgian dan tertib niaga

c. Retribusi Bidang Perdagangan

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau perusahaan atas penggunaan jasa atau fasilitas tertentu. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Retribusi daerah memiliki beberapa fungsi, di antaranya: Membiayai kebutuhan pemerintahan daerah, Membangun daerah, Membuka lapangan pekerjaan baru, Memeratakan pendapatan masyarakat. Dinas perdagangan kota samarinda sebagai salah satu dinas yang masih mengelola pasar rakyat mempunyai kewajiban menarik retribusi pasar rakyat. Retribusi pasar rakyat adalah pungutan daerah yang dibayarkan atas penggunaan fasilitas pasar. Retribusi ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 3.3
REALISASI RETRIBUSI BIDANG PERDAGANGAN PER TAHUN
PERIODE 2020 - 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2020	5.594.000.000	4.465.806.351	79,83
2021	5.750.000.000	5.827.163.839	101,34
2022	6.285.000.000	7.294.520.005	116,06
2023	7.665.000.000	8.561.398.621	111,69
2024	5.359.775.000	6.356.341.821	118,59

Tabel 3.4
Rincian realisasi retribusi Periode 2021 – 2024

No	UPT / Pasar	Realisasi Retribusi				Target
		2021	2022	2023	2024	2025
	DINAS PERDAGANGAN	5.444.145.839	6.906.871.007	8.561.397.921	6.356.341.821	9.039.300.000
1.	UPT Pasar Segiri	2.616.536.339	3.052.320.467	3.288.278.439	4.218.455.852	4.109.303.000
1.1	Pasar Segiri	1.456.521.400	1.605.285.650	1.734.777.938	2.089.965.848	2.057.890.000
1.2	Pasar Merdeka	473.191.939	492.858.317	521.384.901	602.617.504	520.162.000
1.3	Pasar Belutug Lingau	-	-	-	-	-
1.4	Pasar Bengkuring	51.916.000	79.578.000	94.670.000	113.721.800	133.572.000
1.5	Pasar Lok bahu	46.644.000	39.230.000	48.167.900	57.634.050	71.966.000
1.6	Pasar Ijabah	241.531.000	204.897.000	217.207.300	438.583.700	433.840.000
1.7	Pasar Kedondong	346.732.000	630.471.500	672.070.400	915.932.950	891.873.000
2.	UPT Pasar Pagi	2.344.988.100	2.981.044.800	4.121.303.482	2.129.440.369	4.929.997.000
2.1	Pasar Pagi	1.634.372.600	2.055.978.800	3.095.004.382	633.404.969	3.463.445.000
2.2	Pasar Baqa	88.913.000	234.675.000	267.048.000	475.708.000	514.820.000
2.3	Pasar Palaran	240.334.500	270.204.000	296.790.000	367.447.400	391.220.000
2.4	Pasar Harapan Baru	-	-	-	-	-
2.5	Pasar Kemuning	46.644.000	47.325.000	52.615.100	64.659.000	69.608.000
2.6	Pasar Sei. Dama	125.681.000	143.374.000	140.889.000	220.801.000	150.304.000
2.7	Citra Niaga	209.043.000	229.488.000	268.957.000	367.420.000	340.600.000
3.	Metrologi	482.621.400	873.505.740	1.151.816.000	8.445.600	-

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa selama 4 tahun terakhir retribusi Di Bidang Perdagangan selalu melampaui target kecuali pada tahun 2020 dimana Covid-19 telah melanda Indonesia, pada Tahun 2024 Dinas Perdagangan juga memiliki target capaian retribusi Bidang Perdagangan untuk Tahun 2025 Sebagai berikut :

Tabel 3.5
Target Retribusi Tahun 2025

Tahun	Target	Target Per Triwulan	
2025	9.039.300.000	TW I	2.259.825.000
		TW II	2.259.825.000
		TW III	2.259.825.000
		TW IV	2.259.825.000

Untuk Tahun 2025 Bidang Perdagangan kehilangan 1 sumber PAD yaitu Retribusi Tera - Tera Ulang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) menghapus retribusi tera dan tera ulang. Ketentuan ini mulai berlaku sejak 5 Januari 2024.

Tabel 3.6

Rincian Target Retribusi Per Pasar dan Triwulan Tahun 2025

No	UPT / Pasar	Target Retribusi				
		2025	TWI	TWII	TWIII	TWIV
1.	UPT Wilayah 2	4.109.303.000	1.027.325.750	1.027.325.750	1.027.325.750	1.027.325.750
1.1	Pasar Segiri	2.057.880.000	514.472.500	514.472.500	514.472.500	514.472.500
1.2	Pasar Merdeka	520.162.000	130.040.500	130.040.500	130.040.500	130.040.500
1.3	Pasar Belutug Lingau	-	-	-	-	-
1.4	Pasar Bengkuring	133.572.000	33.393.000	33.393.000	33.393.000	33.393.000
1.5	Pasar Lok bahu	71.966.000	17.991.500	17.991.500	17.991.500	17.991.500
1.6	Pasar Ijabah	433.840.000	108.460.000	108.460.000	108.460.000	108.460.000
1.7	Pasar Kedondong	891.873.000	222.968.250	222.968.250	222.968.250	222.968.250
2.	UPT Wilayah 1	4.929.997.000	1.232.499.250	1.232.499.250	1.232.499.250	1.232.499.250
2.1	Pasar Pagi	3.463.445.000	865.861.250	865.861.250	865.861.250	865.861.250
2.2	Pasar Baqa	514.820.000	128.705.000	128.705.000	128.705.000	128.705.000
2.3	Pasar Palaran	391.220.000	97.805.000	97.805.000	97.805.000	97.805.000
2.4	Pasar Harapan Baru	-	-	-	-	-
2.5	Pasar Kemuning	69.608.000	17.402.000	17.402.000	17.402.000	17.402.000
2.6	Pasar Sei. Dama	150.304.000	37.576.000	37.576.000	37.576.000	37.576.000
2.7	Citra Niaga	340.600.000	85.150.000	85.150.000	85.150.000	85.150.000

IV. PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2025

Rencana Program dan Kegiatan merupakan cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana ini juga digunakan untuk mengetahui capaian keberhasilan tujuan dan sasaran.

Pada tahun 2025 Dinas Perdagangan Kota Samarinda mengelola Anggaran Sebesar Rp. 53.682.216.041, - (Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Empat Puluh Satu Rupiah). Yang terdiri dari 7 Program, 16 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan, diantaranya terdapat Belanja Rutin sebanyak 1 Program, 6 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan.

Program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kota Samarinda tahun 2025 sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2025

No	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator IKU / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2025	Satuan target	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung jawab
30.03	URUSAN PERDAGANGAN	Presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha	17,47	Persen	53.798.889.793	Kepala Dinas
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI IKM	88	Nilai	34.001.035.929	Sekretaris
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP	76	Nilai	300.000.000	Kasubbag Program dan Keuangan
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17	Dokumen	150.000.000	PPTK
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	50.000.000	PPTK
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	50.000.000	PPTK
1.1.4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Berita Acara	50.000.000	PPTK
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7	Laporan	21.113.054.138	Kasubbag Program dan Keuangan
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	80	Orang/bulan	13.868.060.870	PPTK
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	7.194.993.268	PPTK
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	50.000.000	PPTK
1.3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jenis Retribusi	3	Jenis	50.000.000	Kasubbag Program dan Keuangan

No	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator IKU / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2025	Satuan target	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1.3.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Dokumen	50.000.000	PPTK
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1	Laporan	685.761.300	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2.706.000	PPTK
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	124.531.000	PPTK
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	137.440.000	PPTK
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	49.593.500	PPTK
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	271.112.000	PPTK
1.4.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	99.998.800	PPTK
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	1	Laporan	8.113.582.116	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	2.071.352.116	PPTK
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	6.042.230.000	PPTK
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	1	Laporan	3.738.618.375	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11	Unit	281.536.000	PPTK
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	Unit	3.203.192.375	PPTK
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	Unit	43.800.000	PPTK
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	210.090.000	PPTK
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (RUP/PSIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	54,05	Persen	400.934.350	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
2.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan Sarana Perdagangan Selain Gudang	100	Persen	54.636.350	Ketua Tim Kerja Pelaku Distribusi
2.1.2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	Dokumen	54.636.350	PPTK
2.2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Presentase Gudang Yang Tidak Memiliki TDG	59,54	Persen	97.988.000	Ketua Tim Kerja Pelaku Distribusi
		Presentase TDG	100	Persen		
2.2.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	14	Dokumen	97.988.000	PPTK
2.3	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin Minol Golongan B dan C	15	Dokumen	248.310.000	Ketua Tim Kerja Pelaku Distribusi
2.3.1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15	Dokumen	248.310.000	PPTK
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	15	Persen	16.826.935.014	Kepala Bidang Sarana Perdagangan
3.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi yang dikelola dan dikembangkan	15	Unit	16.258.950.614	Ketua Tim Kerja Penyediaan Sarana

No	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator IKU / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2025	Satuan target	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung jawab
3.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5	Unit	13.686.644.714	PPTK
3.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7	Unit	2.572.305.900	PPTK
3.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	15	Unit	567.984.400	Ketua Tim Kerja Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
3.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2	Dokumen	100.000.000	PPTK
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	0,02	Nilai	315.247.000	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
		Presentase kinerja realisasi pupuk	70	Persen	30.000.000	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
4.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Presentase Koefisien variasi harga antar waktu	<10	Nilai	315.247.000	Ketua Tim Kerja Pengendalian Barang Pokok dan Penting
4.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4	Laporan	144.802.000	PPTK
4.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	9	Laporan	170.445.000	PPTK
4.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	75	Persen	30.000.000	Ketua Tim Kerja Pengendalian Barang Pokok dan Penting
4.2.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4	Laporan	30.000.000	PPTK
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)	\$134,51	Juta\$	313.614.000	Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor
5.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)	20	Pelaku Usaha	313.614.000	Ketua Tim Kerja Pengembangan Ekspor
5.1.1	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3	Pelaku Usaha	266.760.000	PPTK
5.1.2	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	1	Pelaku Usaha	46.854.000	PPTK
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat UTPP bertanda tara sah yang berlaku	54,03	Persen	1.619.502.000	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
6.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berapa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase BOKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017)	75	Persen	645.575.000	Ketua Tim Kerja Kemetrologian dan tertib niaga
6.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1500	Orang	645.575.000	PPTK
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah UMKM yang bermitra dengan Pelaku Usaha	25	UMKM	291.421.500	Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor
7.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Media Promosi	3	Media	291.421.500	Ketua Tim Kerja PSDN
7.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50	UMKM	238.777.000	PPTK
7.1.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan ritel, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50	UMKM	52.644.500	PPTK
	UPTD Pasar Segiri (Wii 2)					
3.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8	Dokumen	230.707.400	Kepala UPTD Pasar Segiri

No	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator IKU / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2025	Satuan target	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung jawab
	UPT Metrologi					
6.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat - alat UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun berjalan	51,44	Persen	973.927.000	Kepala UPT Metrologi
6.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang	5648	Unit	973.927.000	Kepala UPT Metrologi
	UPTD Pasar Pagi (Wilayah 1)					
3.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7	Dokumen	237.277.000	Kepala UPT Pasar Pagi

Dari program, kegiatan dan sub kegiatan diatas terdapat beberapa indikator kinerja yang ditetapkan berbeda dengan Rencana Kerja Tahun 2025 dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir serta anggaran yang di sediakan pada tahun 2025.

Pada tahun 2025 Dinas perdagangan menggunakan 7 Program terdiri dari 1 Program Rutin, 5 Program prioritas dan 1 program pendukung, program tersebut didukung oleh 16 Kegiatan dan 37 Sub kegiatan.

Tabel 4.2
Review Indikator Kinerja terhadap
RENSTRA 2021 – 2026 dan Penetapan Rencana Kerja Tahun 2025

No	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator IKU / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan target	Target Kinerja RENSTRA/RENJA 2025	Target Kinerja RKT Tahun 2025	Selisih Target	Catatan Analisis
30.03	URUSAN PERDAGANGAN	Presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha	Persen	16,43	17,47	1,04	Penyesuaian Target memperhatikan capaian 3 tahun terakhir sudah mencapai 17,43%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI IKM	Nilai	80	88	8	menyesuaikan standar IKM
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP	Nilai	76	76	0	Sesuai RENJA 2025
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17	17	0	Sesuai RENJA 2025
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	0	Sesuai RENJA 2025
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	0	Sesuai RENJA 2025
1.1.4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Berita Acara	2	2	0	Sesuai RENJA 2025

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator IKU / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan target	Target Kinerja RENSTRA/RENJA 2025	Target Kinerja RKT Tahun 2025	Selisih Target	Catatan Analisis
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	7	7	0	Sesuai RENJA 2025
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	Orang/bulan	100	80	-20	Penyesuaian target dengan jumlah real ASN dan anggaran yang dibutuhkan (Kalkosongan pejabat struktural dan analis perdagangan)
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	0	Sesuai RENJA 2025
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	4	0	Sesuai RENJA 2025
1.3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jenis Retribusi	Jenis	3	3	0	Sesuai RENJA 2025
1.3.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	12	0	Sesuai RENJA 2025
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	1	1	0	Sesuai RENJA 2025
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	0	Sesuai RENJA 2025
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	5	-5	Rasionalisasi Anggaran Sebanyak 50%
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	0	Sesuai RENJA 2025
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	0	Sesuai RENJA 2025
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	10	0	Sesuai RENJA 2025
1.4.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	0	Sesuai RENJA 2025
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	1	1	0	Sesuai RENJA 2025
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	0	Sesuai RENJA 2025
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	0	Sesuai RENJA 2025
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Laporan	1	1	0	Sesuai RENJA 2025
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	11	11	0	Sesuai RENJA 2025
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	50	0	Sesuai RENJA 2025
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	90	90	0	Sesuai RENJA 2025
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	0	Sesuai RENJA 2025
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	54,05	54,05	0	Sesuai RENJA 2025
2.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan Sarana Perdagangan Selain Gudang	Persen	100	100	0	Sesuai RENJA 2025
2.1.2	Fasilitasi Penuhuan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Penuhuan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	100	100	0	Sesuai RENJA 2025
2.2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Gudang Yang Tidak Memiliki TDG	Persen	60,14	59,54	9,6	Peningkatan indikator menyesuaikan terhadap capaian indikator tahun 2024
		Persentase TDG	Persen	100	100	0	Sesuai RENJA 2025
2.2.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	14	14	0	Sesuai RENJA 2025

No	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator IKU / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan target	Target Kinerja RENSTRA/RENJA 2025	Target Kinerja RKT Tahun 2025	Selisih Target	Catatan Analisis
2.3	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin Minol Golongan B dan C	Dokumen	11	15	4	Peningkatan target melihat kemungkinan tambahan penjual langsung di Kota Samarinda
2.3.1	Facilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	15	15	0	Sesuai RENJA 2025
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	15	15	0	Sesuai RENJA 2025
3.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi yang dikelola dan dikembangkan	Unit	15	15	0	Sesuai RENJA 2025
3.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	5	5	0	Sesuai RENJA 2025
3.1.2	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	7	7	0	Sesuai RENJA 2025
3.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	Unit	15	15	0	Sesuai RENJA 2025
3.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	2	2	0	Sesuai RENJA 2025
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	Nilai	0.05	0.02	0.03	Peningkatan target melihat capaian 3 tahun terakhir dan batasan target inflasi dari 1.5 - 3.5
		Presentase kinerja realisasi pupuk	Persen	5	70	65	Peningkatan target menyesuaikan hasil capaian 3 tahun terakhir khususnya tahun 2024
4.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Presentase Koefisien variasi harga antar waktu	Nilai	<13	<10	3	Peningkatan target menyesuaikan hasil capaian 3 tahun terakhir khususnya tahun 2024 dan standar target 10
4.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	4	4	0	Sesuai RENJA 2025
4.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	9	9	0	Sesuai RENJA 2025
4.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Persen	5	75	70	Peningkatan target menyesuaikan hasil capaian 3 tahun terakhir khususnya tahun 2024
4.2.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	4	4	0	Sesuai RENJA 2025
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)	Juta\$	\$89,674	\$134,511	44,837	Peningkatan target menyesuaikan hasil capaian 3 tahun terakhir khususnya tahun 2024
5.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)	Pelaku Usaha	11	20	9	Peningkatan target menyesuaikan hasil capaian 3 tahun terakhir khususnya tahun 2024
5.1.1	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	3	3	0	Sesuai RENJA 2025
5.1.2	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	2	1	-1	Rasionalisasi anggaran dampak hasil capaian tahun 2024
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat UTPP bertanda tera sah yang berlaku	Persen	54,03	54,03	0	Sesuai RENJA 2025
6.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017)	Persen	75	75	0	Sesuai RENJA 2025
6.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	1500	1500	0	Sesuai RENJA 2025
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah UMKM yang bermitra dengan Pelaku Usaha	UMKM	11	25	14	Peningkatan target menyesuaikan hasil capaian 3 tahun terakhir khususnya tahun 2024
7.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Media Promosi	Media	3	3	0	Sesuai RENJA 2025
7.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	2	50	48	Peningkatan target menyesuaikan hasil capaian 3 tahun terakhir khususnya tahun 2024 dan menganalisis potensi yang ada di lapangan

No	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator IKU / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan target	Target Kinerja RENSTRA/RENJA 2025	Target Kinerja RKT Tahun 2025	Selisih Target	Catatan Analisis
7.1.2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	2	50	48	Peningkatan target menyesuaikan hasil capaian 3 tahun terakhir khususnya tahun 2024 dan menganalisis potensi yang ada di lapangan
	UPTD Pasar Segiri (Wil 2)						
3.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	8	8	0	Sesuai RENJA 2025
	UPT Metrologi						
6.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Benapa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat - alat UTPP yang dileta / tera ulang pada tahun berjalan	Persen	51,44	51,44	0	Sesuai RENJA 2025
6.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Benapa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Dileta Ulang	Unit	5648	5648	0	Sesuai RENJA 2025
	UPTD Pasar Pagi (Wilayah 1)						
3.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	7	7	0	Sesuai RENJA 2025

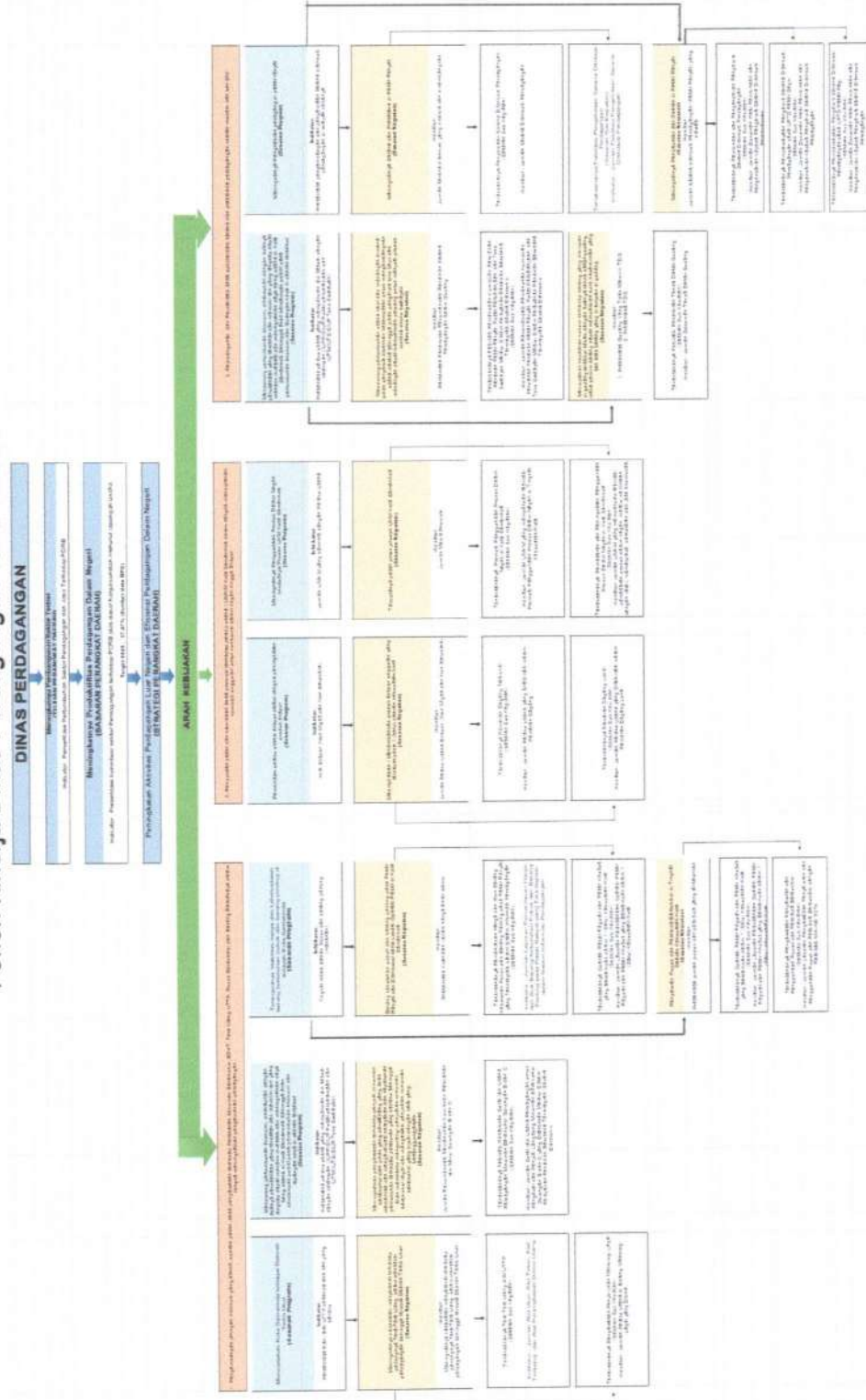
Setelah melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2024 dan memperhatikan potensi pada tahun 2025 maka terjadi beberapa penyesuaian indikator kinerja pada Rencana Kerja tahunan Dinas Perdagangan tahun 2025.

Terdapat 10 peningkatan target yang terdiri dari 1 Indikator Kinerja Utama dari target RENSTRA, 4 Indikator Program, 3 indikator kegiatan dan 2 Indikator Sub kegiatan dari indikator pada RENJA Tahun 2025. Dan terdapat 2 target indikator yang mengalami penyesuaian yaitu indikator pelaksanaan pameran dagang lokal dimana penyesuaian tersebut dampak dari rasionalisasi anggaran prioritas dan memperhatikan capaian tahun 2024 dan target indikator jumlah ASN yang menerima Gaji semula 100 menjadi 80 dampak dari rasionalisasi anggaran dan kekosongan pengganti ASN baik dari pejabat structural dan fungsional karena pension dan meninggal dunia.

Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian target yang telah disusun sampai dengan periode RENSTRA Tahun 2025, dimana pada tahun tersebut akan Kembali disusun Rencana Strategis baru periode 2025 – 2029.

a. Pohon Kinerja

Gambar 5.1
Pohon Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2025



b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan untuk mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data yang dapat dianalisis dan memberikan informasi akurat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Tabel 5.1

PENGUKURAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025

No	Jabatan Penanggung Jawab	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator IKU / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2025	Satuan target	Pagu Anggaran (Rp)	Target Kinerja				Target Keuangan				Penanggung jawab
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
							K	K	K	K	Rp	Rp	Rp	Rp	
30.03	Eselon III	URUSAN PERDAGANGAN	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB atau dasar harga konstan menurut lapangan usaha	17,47	Persen	53.798.686.793	0	0	0	17,47	12.433.742.534	15.148.655.357	12.954.268.829	10.543.588.273	Kepala Dinas
1	Eselon III	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI IKM	88	Nilai	34.001.038.929	0	0	0	88	9.658.895.335	7.913.987.495	7.515.619.610	7.212.481.693	Sekretaris
1.1	Eselon IV	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP	76	Nilai	300.000.000	0	76	0	0	120.484.000	77.156.000	37.580.000	40.780.000	Kasubag Program dan Keuangan
1.1.1	Eselon IV	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17	Dokumen	150.000.000	6	3	8	0	44.134.000	59.946.000	22.000.000	16.420.000	PPTK
1.1.2	Eselon IV	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	50.000.000	1	0	0	2	20.750.000	7.480.000	7.480.000	11.790.000	PPTK
1.1.3	Eselon IV	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	50.000.000	1	1	1	1	18.730.000	8.100.000	8.100.000	12.570.000	PPTK
1.1.4	Eselon IV	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	2	Berita Acara	50.000.000	0	2	0	0	45.670.000	1.630.000	-	-	PPTK

No	Jabatan Penanggung Jawab	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator IKU / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2025	Satuan target	Pagu Anggaran (Rp)	Target Kinerja				Target Keuangan				Total Target keuangan Tahun 2025	Penanggung jawab
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
							K	K	K	K	Rp	Rp	Rp	Rp		
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
1.2	Eselon IV	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7	Laporan	21.113.054.138	0	0	0	7	8.242.769.231	5.634.299.200	4.606.934.400	3.573.398.800	20.057.401.431	Kasubbag Program dan Keuangan
1.2.1	Eselon IV	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	80	Orang/bulan	13.868.060.870	0	0	0	80	3.895.164.669	4.124.219.200	3.093.164.400	2.062.109.557	13.174.657.826	PPTK
1.2.2	Eselon IV	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	7.194.993.268	0	0	0	1	2.323.104.582	1.503.000.000	1.503.000.000	1.506.139.043	6.835.243.605	PPTK
1.2.3	Eselon IV	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	50.000.000	1	1	1	1	24.500.000	7.080.000	10.770.000	5.150.000	47.500.000	PPTK
1.3	Eselon IV	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jenis Retribusi	3	Jenis	50.000.000	0	0	0	3	34.180.000	2.850.000	2.850.000	7.420.000	47.500.000	Kasubbag Program dan Keuangan
1.3.1	Eselon IV	Pelaporan Penghasilan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Penghasilan Retribusi Daerah	12	Dokumen	50.000.000	3	3	3	3	34.180.000	2.850.000	2.850.000	7.420.000	47.500.000	PPTK
1.4	Eselon IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1	Laporan	885.781.300	0	0	0	1	420.382.534	112.214.701	30.150.000	88.745.000	851.492.235	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
1.4.1	Eselon IV	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2.706.000	0	0	2	0	2.540.600	30.100	-	-	2.570.700	PPTK
1.4.2	Eselon IV	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	124.931.000	0	10	0	0	79.694.450	39.000.000	-	-	118.694.450	PPTK
1.4.3	Eselon IV	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	137.440.000	0	0	0	2	53.128.000	40.000.000	25.200.000	12.240.000	130.568.000	PPTK
1.4.4	Eselon IV	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	49.593.500	1	0	3	0	33.233.825	3.300.000	4.950.000	5.630.000	47.113.825	PPTK
1.4.5	Eselon IV	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	271.112.000	3	3	3	1	208.726.799	22.684.801	-	26.145.000	267.558.400	PPTK
1.4.6	Eselon IV	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	99.998.800	0	0	0	1	43.098.960	7.200.000	-	44.730.000	94.998.860	PPTK
1.5	Eselon IV	Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	1	Laporan	8.113.982.116	0	0	0	1	2.040.114.995	1.086.984.000	1.907.164.116	2.873.640.000	7.707.903.011	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
1.5.1	Eselon IV	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	2.071.352.116	0	0	0	1	213.232.395	316.800.000	544.388.116	893.364.000	1.967.784.511	PPTK
1.5.2	Eselon IV	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	6.042.230.000	0	0	0	1	1.826.862.500	770.184.000	1.362.776.000	1.780.276.000	5.740.118.500	PPTK
1.6	Eselon IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	1	Laporan	3.738.618.375	0	0	0	1	791.964.675	1.000.393.594	930.841.094	828.498.093	3.551.687.456	Kasubbag Umum dan Kepegawalan

No	Jabatan Penanggung Jawab	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator IKU / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2025	Satuan target	Pagu Anggaran (Rp)	Target Kinerja				Target Keuangan				Penanggung jawab
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
							K	K	K	K	Rp	Rp	Rp	Rp	
1.6.1	Eselon IV	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	281.538.000	0	0	0	11	119.716.200	-	120.043.000	27.700.000	PPTK
1.6.2	Eselon IV	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	Unit	3.203.192.375	0	0	0	50	640.638.475	800.798.094	800.798.094	800.798.093	PPTK
1.6.3	Eselon IV	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	Unit	43.800.000	0	0	0	90	31.810.000	-	10.000.000	-	PPTK
1.6.4	Eselon IV	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	210.090.000	0	2	0	0	0	199.685.500	-	-	PPTK
2	Eselon III	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (UPPS/UP Pusat perbelanjaan dan IUTM/UTS/UP Toko Swalayan)	54,05	Persen	400.934.350	8,11	10,81	16,22	18,92	80.140.152	153.357.388	140.577.605	26.812.487	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
2.1	JF (Penyetara n)	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Presentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan Sarana Perdagangan Selain Gudang	100	Persen	54.638.350	25	25	25	25	8.195.452	20.898.403	19.156.870	3.653.807	Ketua Tim Kerja Pelaku Distribusi
2.1.2	JF (Penyetara n)/Ketua Tim	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	Dokume n	54.638.350	15	20	30	35	8.195.452	20.899.403	19.156.870	3.653.807	PPTK
2.2	JF (Penyetara n)	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Presentase Gudang Yang Tidak Memiliki TDG	59,54	Persen	97.988.000	0	0	0	59,54	14.898.200	37.480.410	34.357.042	6.552.948	Ketua Tim Kerja Pelaku Distribusi
2.2.1	JF (Penyetara n)/Ketua Tim	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Presentase TDG	100	Persen	97.988.000	25	25	25	25	14.898.200	37.480.410	34.357.042	6.552.948	PPTK
2.3	JF (Penyetara n)	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengac ra dan Penjual Langgung Minum di Tempat	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin Minol Golongan B dan C	15	Dokume n	248.310.000	2	3	3	7	37.246.500	94.978.575	87.063.693	16.605.732	Ketua Tim Kerja Pelaku Distribusi
2.3.1	JF (Penyetara n)/Ketua Tim	Facilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengac ra dan Penjual Langgung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diberikan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15	Dokume n	248.310.000	2	3	3	7	37.246.500	94.978.575	87.063.693	16.605.732	PPTK
3	Eselon III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi	15	Persen	16.828.935.014	0	0	0	15	2.295.407.507	6.247.821.299	4.488.729.364	2.953.830.093	Kepala Bidang Sarana Perdagangan

No	Jabatan Penanggung Jawab	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator IKU / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2025	Satuan target	Pagu Anggaran (Rp)	Target Kinerja				Target Keuangan				Penanggung jawab	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
							K	K	K	K	Rp	Rp	Rp	Rp		
			perdagangan di wilayah kerjanya													
3.1	JF (Penyetrans n)	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi yang dikelola dan dikembangkan	15	Unit	16.258.950.614	0	0	0	15	2.052.996.707	6.114.248.069	4.408.679.364	2.870.078.943	16.446.003.983	Ketua Tim Kerja Penyediaan Sarana
3.1.1	JF (Penyetrans n) /Ketua Tim	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5	Unit	13.686.544.714	0	0	2	3	2.052.996.707	4.105.993.414	4.105.993.414	2.737.328.943	13.002.312.478	PPTK
3.1.2	JF (Penyetrans n) /Ketua Tim	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7	Unit	2.572.305.900	0	0	4	3	0	2.008.254.655	302.685.950	132.750.000	2.443.690.605	PPTK
3.2	JF (Penyetrans n)	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	15	Unit	567.984.400	0	0	0	15	242.410.800	133.573.230	80.050.000	83.551.150	539.565.180	Ketua Tim Kerja Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
3.2.1	JF (Penyetrans n) /Ketua Tim	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2	Dokumen	100.000.000	0	0	0	2	15.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	86.000.000	PPTK
4	Eselon III	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	0.02	Nilai	315.247.000	0	0	0	0.02	148.298.200	66.364.150	42.510.600	41.311.700	299.484.650	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
			Presentase kinerja realisasi pupuk	70	Persen	30.000.000	0	0	0	70	1.915.200	13.178.400	7.660.800	5.745.600	28.500.000	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
4.1	JF (Penyetrans n)	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Presentase Koefisien variasi harga antar waktu	<10	Nilai	315.247.000	0	0	0	10	148.298.200	66.364.150	42.510.600	41.311.700	299.484.650	Ketua Tim Kerja Pengendalian Barang Pokok dan Penting
4.1.1	JF (Penyetrans n) /Ketua Tim	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4	Laporan	144.802.000	1	1	1	1	18.331.200	35.408.400	42.510.600	41.311.700	137.561.900	PPTK
4.1.2	JF (Penyetrans n) /Ketua Tim	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	9	Laporan	170.445.000	9	0	0	0	130.967.000	30.965.750	-	-	161.922.750	PPTK
4.2	JF (Penyetrans n)	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubdi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	75	Persen	30.000.000	0	0	0	75	1.915.200	13.178.400	7.660.800	5.745.600	28.500.000	Ketua Tim Kerja Pengendalian Barang Pokok dan Penting
4.2.1	JF (Penyetrans n) /Ketua Tim	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubdi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubdi dengan Realisasi Minimal 90%	4	Laporan	30.000.000	1	1	1	1	1.915.200	13.178.400	7.660.800	5.745.600	28.500.000	PPTK

No	Jabatan Penanggung Jawab	Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator IKU / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2025	Satuan target	Pagu Anggaran (Rp)	Target Kinerja				Target Keuangan				Penanggung jawab		
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV			
							K	K	K	K	Rp	Rp	Rp	Rp			
6	Eselon III	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)	\$134,51	Juta\$	313.814.000	0	0	0	0	\$134,51	62.772.000	85.841.300	119.430.000	30.090.000	297.933.300	Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor
5.1	JF (Penyeta raan)	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Milial Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)	20	Pelaku Usaha	313.814.000	0	0	0	0	20	62.772.000	85.841.300	119.430.000	30.090.000	297.933.300	Ketua Tim Kerja Pengembangan Ekspor
5.1.1	JF (Penyeta raan) / Ketua Tim	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3	Pelaku Usaha	288.760.000	0	1	1	1	1	62.772.000	44.320.000	119.430.000	26.900.000	253.422.000	PPTK
5.1.2	JF (Penyeta raan) / Ketua Tim	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	1	Pelaku Usaha	46.854.000	0	1	0	0	0	0	41.321.300	-	3.190.000	44.511.300	PPTK
6	Eselon III	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat UTPP bertanda tera sah yang berlaku	54,03	Persen	1.819.502.000	0	0	0	0	54,03	174.311.175	515.288.925	591.341.650	237.585.150	1.539.528.900	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
6.1	JF (Penyeta raan)	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Uang, dan Pengawasan	Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Permendag No. 28/M- DAG/PER/2017)	75	Persen	645.575.000	0	0	0	0	75	28.222.125	223.110.825	298.163.550	62.799.750	813.296.250	Ketua Tim Kerja Kemetrologian dan tertib naga
6.1.2	JF (Penyeta raan) / Ketua Tim	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Ditina	1500	Orang	645.575.000	58	608	633	201	201	28.222.125	223.110.825	298.163.550	62.799.750	813.296.250	PPTK
7	Eselon III	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah UMKM yang bermitra dengan Pelaku Usaha	25	UMKM	291.421.500	0	0	0	0	25	32.918.165	186.195.000	56.060.000	21.877.150	276.850.315	Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor
7.1	JF Penyeta raan	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Media Promosi	3	Media	291.421.500	1	1	1	1	0	32.918.165	186.195.000	56.060.000	21.877.150	276.850.315	Ketua Tim Kerja P3DN
7.1.1	JF (Penyeta raan) / Ketua Tim	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50	UMKM	238.777.000	0	0	0	0	50	32.661.000	154.000.000	18.500.000	21.877.150	226.838.150	PPTK
7.1.2	JF (Penyeta raan) / Ketua Tim	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produ Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan ritel, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50	UMKM	52.644.500	0	0	50	0	0	257.165	12.195.000	37.560.000		50.012.165	PPTK
		UPTD Pasar Segiri (Wii 2)															
3.2.2	Eselon IV	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8	Dokume n	230.707.400	0	0	0	8	8	112.718.800	77.923.230	3.900.000	24.630.000	219.172.030	Kepala UPT Pasar Segiri

No	Jabatan Penanggung Jawab	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator IKU / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2025	Satuan target	Pagu Anggaran (Rp)	Target Kinerja					Target Keuangan					Penanggung jawab
							TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total Target keuangan Tahun 2025	
							K	K	K	K		Rp	Rp	Rp	Rp		
		UPT Metrologi															
6.1	Eselon IV	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat - alat UTP yang citra / tera ulang pada tahun berjalan	51,44	Penen	973.927.000	1,82	18,21	20,04	11,37		146.089.050	292.178.100	292.178.100	194.785.400	925.230.650	Kepala UPT Metrologi
6.1.1	Eselon IV	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Penengkapan Dikera Ulang	5548	Unit	973.927.000	200	2000	2200	1248		146.089.050	292.178.100	292.178.100	194.785.400	925.230.650	Kepala UPT Metrologi
		UPTD Pasar Pagi (Wilayah 1)															
3.2.2	Eselon IV	Pemberdayaan Pengedola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengedola Sarana Distribusi Perdagangan	7	Dokumen	237.277.000	0	0	0	7		114.892.000	25.650.000	46.150.000	38.921.150	225.413.150	Kepala UPT Pasar Pagi

c. Cascading / Pejenjangan Kinerja

Cascading kinerja adalah strategi untuk mencapai hasil kerja yang dilakukan dengan menjabarkan dan menyelaraskan target kinerja secara vertikal dari level unit atau pegawai yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Tujuannya adalah agar seluruh komponen organisasi bergerak menuju tujuan yang sama.

Cascading kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Tabel 5.2

PENJENJANGAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025

Sasaran Daerah	SASARAN STRATEGIS RENSTRA PD (RHK-JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA)	STRATEGI	ARAH KEBIAYAAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (IKI JABATAN ADMINISTRATOR)	JABATAN ADMINISTRATOR	TARGET ET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (IKI JABATAN PENGAWAS/ SUBKORIKETU A TIM)	JABATAN PENGAWAS/ SUBKORIKETU A TIM	TARGET ET 2025	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN (IKI JABATAN PENGAWAS/ SUBKORIKETU A TIM / PPTK)	JABATAN PENGAWAS/ SUBKORIKETU A TIM / PPTK	TARGET 2025	IKI JFT / PELAKSANA	TARGET 2025
Meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik	Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM	Sekretaris	88,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Kasubag Program dan keuangan	76,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PPTK	17,00	Jumlah Data / Dokumen Perencanaan Kinerja	17 Dokumen
													Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PPTK	3,00	Jumlah Laporan E Tepian dan E Money per Triwulan	
													Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PPTK	4,00	Jumlah Laporan Evaluasi RENJA Per Triwulan	

Sasaran Daerah	SASARAN STRATEGIS RENSTRA PD (RHK JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA)	STRATEGI	ARAH KEBUJUKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (IKI JABATAN ADMINISTRATOR)	JABATAN ADMINISTRATOR	TARGET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (IKI JABATAN PENGAWAS / SUBKORIK ETUA TIM / A TIM)	JABATAN PENGAWAS / SUBKORIK ETUA TIM	TARGET 2025	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN (IKI JABATAN PENGAWAS/SUBKORIK ETUA TIM / PPTK)	JABATAN PENGAWAS /SUBKORIK ETUA TIM / PPTK	TARGET 2025	IKI JFT / PELAKSANA	TARGET 2025
												Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	PPTK	2,00	Jumlah pelaksanaan Forum	2 Kegiatan
												Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	PPTK	80,00	Laporan Data Kepegawaian	4 Laporan
												Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PPTK	1,00	Laporan Data Pegawai Non ASN /PPPK	4 Laporan
												Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PPTK	4,00	Jumlah Laporan Realisasi / Pengangung Jawaban Keuangan Per Triwulan	4 Laporan
												Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PPTK	12,00	Jumlah Laporan Realisasi Retribusi	12 Laporan
												Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididirikan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididirikan	PPTK	2,00	Jumlah Laporan Administrasi Umum	4 Laporan
												Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididirikan	PPTK	10,00	Administrasi Pengadaan	10 Paket
												Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dididirikan	PPTK	2,00	Jumlah Laporan Logistik Per triwulan	4 Laporan
												Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Dididirikan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dididirikan	PPTK	4,00	Jumlah Laporan Bahan Cetak Per triwulan	4 Laporan

SASARAN STRATEGIS RENCANA PT (RHK JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (IKI JABATAN ADMINISTRATOR)	JABATAN ADMINISTRATOR	TARGET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (IKI JABATAN PENGAWAS / SUBKORIK ETUA TIM / KETUA TIM / PPTK)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN (IKI JABATAN PENGAWAS / SUBKORIK ETUA TIM / PPTK)	JABATAN PENGAWAS / SUBKORIK ETUA TIM / PPTK	TARGET 2025	KUJFT / PELAKSANA	TARGET 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Sasaran Daerah		2	Pencapaian pasar dan mitra usaha / UMKM Kota Samarinda dalam rangka meningkatkan komoditi unggulan untuk konsumsi dalam negeri hingga Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor	134,51	Kegiatan Penyelenggaraan an Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kekua Tim Pengembangan an Ekspor	3	Laporan Pelaksanaan Promosi Luar daerah	3 Laporan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah UMKM yang bermitra dengan Pelaku Usaha		25,00	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Media Promosi	Kekua Tim P3DN	Kekua Tim P3DN	50	Data dan laporan pelaksanaan promosi P3DN	3 laporan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Sasaran Daerah	SASARAN STRATEGIS (PENSTRATEGISAN) (PILIHAN TINGKAP PRATAMA)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (IKI JABATAN ADMINISTRATOR)	JABATAN ADMINISTRATOR	TARGET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (IKI JABATAN PENGAWAS / SUBKORIKETU A TIM)	JABATAN PENGAWAS / SUBKORIKETU A TIM	TARGET 2025	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN (IKI JABATAN PENGAWAS / SUBKORIKETU A TIM)	JABATAN PENGAWAS / SUBKORIKETU A TIM	TARGET 2025	IKI JFT / PELAKSANA	TARGET 2025
Sasaran Daerah	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3	Pembangunan dan Revitalisasi serta optimalisasi sarana dan prasarana perdagangan modern dan ber-SNI	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP P Pusat, perbelanjaan dan IUTMA/UTS /SIUP Toko Swalayan)	Kepala Bidang Perdagangan Dalam negeri	54,05	Kegiatan Penribitan Izin Perdagangan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Presentase Penribitan Rekomendasi Perizinan Sarana Perdagangan Selain Gudang	Ketua Tim Pelaku Distribusi	100%	Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Kebutuhan Perizinan Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Ketua Tim Pelaku Distribusi	100	Laporan pelaksanaan layanan fasilitas perizinan	12 Laporan
								Kegiatan Penribitan Izin Perdagangan	Presentase Penribitan Gudang Yang Tidak Memiliki TDG	Ketua Tim Pelaku Distribusi	100 % 69,54 %	Fasilitas Penribitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Ketua Tim Pelaku Distribusi	14	Laporan pelaksanaan layanan fasilitas perizinan	12 Laporan
								Kegiatan Pembangunan dan Perdagangan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi yang dikelola dan dikembangkan	Ketua Tim Penyediaan Sarana	15	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Ketua Tim Penyediaan Sarana	5	Laporan administrasi pembangunan / pengembangan sarana distribusi	5 laporan
								Kegiatan Pembinaan dan Perdagangan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	Ketua Tim Penyediaan Sarana	15	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Ketua Tim Penyediaan Sarana	7	Laporan Administrasi Fasilitas Pasar rakyat	7 Laporan
								Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	Ketua Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	15	Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Ketua Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	2	Laporan Pengawasan, Pembinaan dan Reribus Pasar Rakyat Yang Dikelola Pemerintah	14 laporan
								Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	Ketua Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	15	Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar Segiri)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Ketua UPT Pasar Segiri	8	Laporan Pengelolaan Pasar	8 Laporan
								Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	Ketua Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	15	Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar Segiri)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Ketua UPT Pasar Segiri	7	Laporan Pengelolaan Pasar	7 Laporan
								Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	Ketua Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	15	Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar Segiri)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Ketua UPT Pasar Segiri	7	Laporan Pengelolaan Pasar	7 Laporan
								Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	Ketua Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	15	Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar Segiri)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Ketua UPT Pasar Segiri	7	Laporan Pengelolaan Pasar	7 Laporan
								Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	Ketua Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	15	Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar Segiri)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Ketua UPT Pasar Segiri	7	Laporan Pengelolaan Pasar	7 Laporan

Sasaran Daerah	SASARAN STRATEGIS (RENCANA RP, RPK, JABATAN, PIMPINAN, TINGKAT PRATAMA)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (IKI JABATAN ADMINISTRASI)	JABATAN ADMINISTRATOR	TARGET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (IKI JABATAN PENGAWAS/UBKORIKETU A TIM)	JABATAN PENGAWAS/UBKORIKETUA TIM	TARGET 2025	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN (IKI JABATAN PENGAWAS/UBKORIKETUA TIM / PPTK)	JABATAN PENGAWAS/UBKORIKETUA TIM / PPTK	TARGET 2025	IKI JFT / PELAKSANA	TARGET 2025
Indikator Tujuan	Indikator Sasaran		Pengembangan jaringan distribusi yang efektif, yang efisien, pasar, serta pengawasan terhadap Peredaran Minuman Beralkohol, BOKT, Tera Ulang UTTP, Pupuk	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	Kepala Bidang Perdagangan Dalam negeri	0.02	Kegiatan Pengendalian Harga, Stok, Barang, Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Presentase Koefisien variasi harga antar waktu	Kelua Tim Pengendalian Bapokting	<10	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kelua Tim Pengendalian Bapokting	4	Laporan komoditi yang diawasi	28 Komoditi
					Presentase kinerja realisasi pupuk (Urea dan NPK)			Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				
					Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPPSIU P Pusat dan IUPWITS RIUP Toko Swalayan)			Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Gogongan B dan C untuk Pengoper dan Penjual Langsung di Tempat	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Kontimen Peredaran Izin Minol Gogongan B dan C			Penyusunan dan Pengawasan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Gogongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengoper dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Gogongan B dan C yang diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
					Presentase alat - alat UTTP bertanda tera sah			Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera	Presentase alat - alat UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun berjalan			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlangkapan Ditera Ulang				
Target 2025 : 8,3 %	Target 2025 : 17,47 %		4	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			54.05		15	Kelua Tim Pelaku Distribusi	15	Facilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Gogongan B dan C	Kelua Tim Pelaku Distribusi		15	Laporan pelaksanaan layanan fasilitasi perizinan	15 Laporan
				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			54.03		51,44 %	Kepala UPT Metrologi	51,44 %	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kepala UPT Metrologi		5648	JFT penera : Jumlah Alat UTTP Yang Ditera - Tera Ulang	5648 Alat UTTP

Sasaran Daerah	SASARAN STRATEGIS (RENSTRA PD / RHK JABATAN / PIMPINAN TINGGI / PRATAMA)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (IKI JABATAN ADMINISTRATOR)	JABATAN ADMINISTRATOR	TARGET ET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (IKI JABATAN PENGAWAS / SUBKOR / ETUA TIM)	JABATAN PENGAWAS / SUBKOR / ETUA TIM	TARGET ET 2025	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN (IKI JABATAN PENGAWAS / SUBKOR / ETUA TIM / PPTK)	JABATAN PENGAWAS / SUBKOR / ETUA TIM / PPTK	TARGET 2025	IKI JFT / PELAKSANA	TARGET 2025
					yang berlaku			Ulang, dan Pengawasan								Pelaksana : Laporan Operasional Layanan Tera - Tera Ulang	4 Laporan
									Pencantaaan BDKT yang diawasi terhadap kelakuan yang berlaku (Permendag No. 28/M-DAG/PER/520-17)	Kelua Tim Kemetriologi n dan terab Niaga	75%	Pengawasan/penyuluhan an Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kelua Tim Kemetriologi n dan terab Niaga	1500	JFT Pengawasan/pengamat Tera : Jumlah Pelaku Usaha Yang Diawasi	1500 Pelaku Usaha
																Pelaksana : Jumlah Laporan penyuluhan Metrologi	4 laporan

d. Rencana Aksi

Rencana aksi biasanya mencakup indikator kinerja, aktivitas yang akan dilakukan, dan waktu pelaksanaan. Untuk memantau dan mengevaluasi progres dari suatu rencana aksi, dapat digunakan Matrik Capaian Rencana Aksi. Rencana aksi juga dibuat dalam rangka mengendalikan anggaran belanja yang digunakan setiap Sub Kegiatan, memastikan bahwa belanja yang digunakan benar – benar mendukung rencana aksi sesuai dengan target yang ingin di capai.

Adapun Contoh belanja – belanja yang tidak mendukung langsung rencana aksi ialah belanja yang tidak ada korelasi atau dampak langsung pada rencana aksi seperti : Belanja Honorarium Pengelola Keuangan, Belanja Perjalanan Dinas yang tidak relevan, belanja Modal Umum dan lainnya.

Tabel 5.3
RENCANA AKSI DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan / Rencana Aksi	Output		Aspek Tata Kelola	Target				Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah/ Unit Kerja / Bagian		Keterangan
		Satuan	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV			Koordinator	Stakeholder	
3.30	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA									19.124.422.164	20.297.652.064	94,22%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									410.218.800	499.998.800	82,04%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									228.740.000	300.000.000	75,58%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									135.000.000	150.000.000	90,00%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.01.0001.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	Perencanaan & Penganggaran	6	3	8	0	17	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	Sekretariat Dinas Perdagangan	Bappeda, BPKAD, Dinas Perdagangan (Subbag Program dan Keuangan)	Penyusunan Dokumen RENSTRA, RENJA N+1, P-RENJA, RKT, PK, Manajemen Risiko dan Pengendalian
3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									45.870.000	50.000.000	91,74%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.01.0006.1	Evaluasi dan Updating Capaian Kinerja SKPD	Laporan	Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	Perencanaan & Penganggaran	1	1	1	1	4	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	Sekretariat Dinas Perdagangan	Bappeda, BPKAD, Inspektoral dan Dinas Perdagangan (Subbag Program dan Keuangan)	Evaluasi Renc Perangkat Daerah
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									45.870.000	50.000.000	91,74%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.01.0007.1	Melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah secara sistematis dan berkala	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan & Penganggaran	1	1	1	1	4	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	Sekretariat Dinas Perdagangan	Bappeda, BPKAD, Inspektoral dan Dinas Perdagangan (Subbag Program dan Keuangan)	Penyusunan LAKIP dan Pelaporan E Tajian dan E Movev
3.30.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen									45.870.000	50.000.000	91,74%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.01.0010.1	Pelaksanaan Forum PD Bidang Perdagangan	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Forum Perangkat Daerah	Perencanaan & Penganggaran	0	2	0	0	2	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	Sekretariat Dinas Perdagangan	Instansi / Stakeholder terkait	Forum Bang Perdagangan dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan
3.30.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									45.870.000	50.000.000	91,74%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									45.870.000	50.000.000	91,74%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.02.0005.1	Pelaporan Realisasi Anggaran	Laporan	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Perhitungan	Perencanaan & Penganggaran	1	1	1	1	4	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	Sekretariat Dinas Perdagangan	Bappeda, BPKAD, Inspektoral dan Dinas Perdagangan (Subbag Program dan Keuangan)	Pelaporan Realisasi keuangan

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan / Rencana Aksi	Output		Aspek Tata Kelola	Target					Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah/ Unit Kerja / Bagian		Keterangan
		Satuan	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Stakeholder	
3.30.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendataan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah													
3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah													
3.30.01.2.04.0007.1	Pelaporan Capaian Retribusi Bidang Perdagangan	Laporan	Jumlah Laporan Realisasi Capaian Retribusi	Perencanaan & Penganggaran	3	3	3	3	12	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	45.870.000	Sekretariat Dinas Perdagangan	Bappedida, BPKAD, Inspektorat, Bappeda dan Dinas Perdagangan (Subbag Program dan keuangan)	Laporan Retribusi Bidang perdagangan
3.30.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah													
3.30.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
3.30.01.2.06.0011.1	Pengembangan Website Resmi Dinas Perdagangan	Bulan	Jumlah Bulan upload data Harga dan Stok pada Sistem Informasi Perdagangan	Teknologi Informasi	3	3	3	3	12	Langsung terkait dengan masyarakat	76.738.800	Sekretariat Dinas Perdagangan	Bappedida, BPKAD, Diskominfo dan Dinas Perdagangan (Subbag Program dan keuangan)	Pemeliharaan dan Pengembangan Data dan Informasi via Website : Didag.samarindakota.go.id
3.30.01.2.06.0011.2	Pemeliharaan Jaringan Dinas Perdagangan	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Jaringan	Teknologi Informasi	0	0	0	1	1	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	15.000.000	Sekretariat Dinas Perdagangan	Bappedida, BPKAD, Diskominfo dan Dinas Perdagangan (Subbag Program dan keuangan)	Pemeliharaan Jaringan Internet Dinas Perdagangan
3.30.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										5.920.550.000	6.042.230.000	97,99%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.06.0004.1	Pengadaan Tenaga Outsourcing	Orang/Bulan	Jumlah tenaga Outsourcing Bidang Perdagangan	SDM	342	342	407	537	1628	Langsung terkait dengan masyarakat	5.920.550.000	Sekretariat Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Penyedia Jasa	Tenaga Outsourcing Kebersihan, keamanan, Sopir dan supporting Aplikasi
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN													
3.30.02.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan													
3.30.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Perolehan Perizinan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
3.30.02.2.01.0001.1	Memberikan fasilitas penerbitan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Proses Bisnis	15	20	30	35	100	Langsung terkait dengan masyarakat	7.065.350	Bidang Perdagangan Dalam negeri	DISDAG, BP2TSP dan Pelaku Usaha	Fasilitas perizinan Pasar rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan
3.30.02.2.01.0001.2	Memberikan Surat Keterangan Tempat Usaha Berjalan bagi pedagang Pasar	SKTUB	Jumlah SKTUB	Proses Bisnis	500	500	500	500	2000	Langsung terkait dengan masyarakat	44.791.000	Bidang Perdagangan Dalam negeri	DISDAG, BP2TSP dan Pelaku Usaha	Fasilitas perizinan pedagang pasar rakyat

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan / Rencana Aksi	Output		Aspek Tata Kelola	Target				Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah/ Unit Kerja / Bagian		Keterangan
		Satuan	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV			Total	Koordinator	
3.30.02.2.02	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang												
3.30.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang												
3.30.02.2.02.0001.1	Memfasilitasi Terbitnya Tanda Daftar Gudang	Dokumen	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Proses Bisnis	3	3	3	5	14	71.424.000	Bidang Perdagangan Dalam negeri	DISDAG, BP2TSP dan Pelaku Usaha	Fasilitas perizinan Gudang
3.30.02.2.02.0001.2	Pengawasan terhadap TDG	Laporan	Jumlah Laporan	Pengawasan	10	10	10	9	39	6.785.000	Bidang Perdagangan Dalam negeri	DISDAG, BP2TSP dan Pelaku Usaha	Pengawasan gudang di Kota Samarinda
3.30.02.2.05	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat												
3.30.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C												
3.30.02.2.02.0001.1	Memfasilitasi Terbitnya Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol	Dokumen	Jumlah Dokumen Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	Proses Bisnis	2	3	3	7	15	20.232.000	Bidang Perdagangan Dalam negeri	DISDAG, BP2TSP dan Pelaku Usaha	Fasilitas perizinan tempat usaha minum
3.30.02.2.02.0001.2	Melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol	Tempat usaha	Jumlah tempat usaha minuman beralkohol	Pengawasan	7	7	7	6	27	214.005.000	Bidang Perdagangan Dalam negeri	DISDAG, BP2TSP, Tim Terpadu Pengawasan Minol dan Pelaku Usaha	Pengawasan tempat usaha minum terhadap 17 penjual langsung dan 10 distributor
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												
3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan												
3.30.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan												
3.30.03.2.01.0001.1	Pembangunan/Revisi/asi/ Pengembangan Pasar Rakyat	Pasar	Jumlah Pasar yang Dibangun/revitalisasi	Proses Bisnis	0	0	1	1	2	8.594.410.000	Bidang Sarana Perdagangan	DISDAG, PUPR, Tenaga Teknis	Pembangunan pasar buah dan revitalisasi pasar regeri
3.30.03.2.01.0001.2	Penyediaan Sarana Pasar Rakyat	Pasar	Jumlah Pasar Yang difasilitasi sarana	Proses Bisnis	0	0	0	2	2	4.404.370.714	Bidang Sarana Perdagangan	DISDAG, PUPR, Tenaga Teknis	Penyediaan IPAL Pasar Merdeka dan Baga
	3	Pemeliharaan Pasar Rakyat	Jumlah Pasar Yang dipelihara	Proses Bisnis	0	0	1	0	1	225.000.000	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Pemeliharaan pasar Sungai Dana

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan / Rencana Aksi	Output		Aspek Tata Kelola	Target				Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Perangkat Dasar/ Unit Kerja / Bagian		Keterangan	
		Satuan	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV			Total	Koordinator		Stakeholder
3.30.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan													
3.30.03.2.01.0002.	1 Fasilitas Pengelolaan Sarana Perdagangan Di luar Bangunan	Pasar	Jumlah Pasar Yang Di Fasilitas diluar Bangunan	Proses Berlita	0	0	4	3	7	Langsung terkait dengan masyarakat	2.439.251.900	Bidang Sarana Perdagangan	Bidang Sarana, UPT Pasar dan Pengelola Pasar	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya													
3.30.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan													
3.30.03.2.02.0001.	1 Pengawasan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Rupiah	Jumlah Retribusi Pasar rakyat	Proses Berlita	225982500	225982500	225982500	225982500	9039300000	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	88.562.500	Bidang Sarana Perdagangan	Bidang Sarana, UPT Pasar dan Pengelola Pasar	Anggaran Untuk Rencana Aksi
														Pengawasan terhadap penarikan retribusi pasar rakyat
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING													
3.30.04.2.02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota													
3.30.04.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan													
3.30.04.2.02.0002.	1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada 10 Pasar Rakyat serta Distributor Barang Kebutuhan Pokok	Laporan	Terlaksananya Laporan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengawasan	1	1	1	1	4	Langung terkait dengan masyarakat	131.692.000	Bidang Perdagangan Dalam negeri	Ditdag, UPT Pasar dan Pengelola Pasar	Pengawasan terhadap Harga dan Stok Barang pokok khususnya makanan
3.30.04.2.02.0003	Sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
3.30.04.2.02.0003	1 Pelaksanaan Pasar Murah	Lokasi	Laporan Penyelenggaraan Pasar Murah	Pengawasan	9	0	0	0	9	Langung terkait dengan masyarakat	154.045.000	Bidang Perdagangan Dalam negeri	DISDAG, RETAIL, PERUMDA dan Bulog	Pelaksanaan pasar murah dalam rangka menekan laju inflasi menghadapi HBKN
3.30.04.2.03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
3.30.04.2.03.0003	Sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersidi													
3.30.04.2.03.0003.	1 Pengawasan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersidi pada distributor pupuk dan Kios Tani	Laporan	Terlaksananya Laporan Pengawasan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersidi	Pengawasan	1	1	1	1	4	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	30.000.000	Bidang Perdagangan Dalam negeri	DISDAG, PERTANIAN, DISTRIBUTOR dan KIOS TANI	Pengawasan penyaluran pupuk bersubidi

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan / Rencana Aksi	Output		Aspek Tata Kelola	Target					Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah/ Unit Kerja / Bagian		Keterangan
		Satuan	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Stakeholder	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR													
3.30.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional													
3.30.05.2.01.0002.1	Mengikuti Kegiatan Pameran/Expo Di Tingkat Nasional	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Yang Diselenggarakan Dalam Pameran Dagang Nasional	Proses Bisnis	0	2	1	0	3	Langsung terkait dengan masyarakat	240.540.000	Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor	DISDAG Kota Samarinda, DISKUMI Kota Samarinda, DPMPTSP Kota Samarinda, DISFORAPAR Kota Samarinda dan Penyelenggara Event	Mengikuti/Melaksanakan Pameran pada Event : APEKSI di Surabaya, ITTAF di Palembang dan ITTAF di Lombok
3.30.05.2.01.0003	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal													
3.30.05.2.01.0003.1	Mengikuti Kegiatan Pameran/Expo Di Dalam Wilayah Kota Samarinda Sebanyak 1 (Satu) Kali	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Yang Diselenggarakan Dalam Pameran Dagang Lokal	Proses Bisnis	0	1	0	0	1	Langsung terkait dengan masyarakat	46.854.000	Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor	DPMPTSP Provinsi Kalimantan dan Penyelenggara Event	Mengikuti pameran/expo dalam rangka HUT Pemprov Kalimantan di Big Mall
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN													
3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan													
3.30.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal													
3.30.06.2.01.0002.1	Pengawasan Alat Ukur, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), BDKT dan Satuan Ukuran (SU)	Orang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pengawasan	57	345	530	199	1131	Langsung terkait dengan masyarakat	364.949.000	Bidang Perdagangan Dalam negeri	DISDAG, SPBU, SPPBE, Agen Gas dan Pelaku Usaha	Melakukan Pengawasan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran
3.30.06.2.01.0002.2	Penyuluhan Metrologi Legal	Orang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	SDM	1	263	103	2	369	Langsung terkait dengan masyarakat	223.876.000	Bidang Perdagangan Dalam negeri	UPT Pasar, Pengelola dan Pelaku Usaha	Melakukan Penyuluhan kepada Pelaku Usaha tentang Metrologi Legal

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan / Rencana Aksi	Output		Aspek Tata Kelola	Target					Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah/ Unit Kerja / Bagian		Keterangan
		Satuan	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Stakeholder	
3.30.07	PROGRAM PENGUNJUAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI													
3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri													
3.30.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota													
3.30.05.2.01.0005.	Melaksanakan Promosi Penggunaan produk Dalam Negeri khususnya produk-produk dari UMKM lokal	Media	Jumlah Media Promosi	Proses Bisnis	1	1	1	0	3	Langsung terkait dengan masyarakat	205.161.000	Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	menggunakan Media Promosi Media Cetak, Elektronik dan Kameral
3.30.07.2.01.0006	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota													
3.30.07.2.01.0006.	Melakukan fasilitasi dalam hal kemitraan dengan ritel, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi lainnya	UMKM	Jumlah UMKM yang difasilitasi	Proses Bisnis	0	0	50	0	50	Langung terkait dengan masyarakat	52.644.500	Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor	DISDAG dan Pelaku Usaha (Retail dan Perhotelan)	Melaksanakan Bisnis Matching
	UPT PASAR SEGIRI													
3.30.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan													
1	Penerimaan Retribusi	Rupiah	Jumlah Penerimaan Retribusi dibawah Koordinasi UPT Pasar Segiri	Proses Bisnis	514472500	514472500	514472500	514472500	2057890000	Langung terkait dengan masyarakat	169.263.400	UPT PASAR SEGIRI	Pengelola Pasar	Anggaran Untuk Rencana Aksi
														Pengelolaan pasar rakyat dengan penarikan retribusi pasar
	UPT METROLOGI LEGAL													
3.30.06.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang													
1	Layanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Teker, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Pasar	Jumlah Pasar Yang Di tera - tera Ulang	Proses Bisnis	0	9	11	0	20	Langung terkait dengan masyarakat	636.617.000	UPTD Metrologi	UPTD Metrologi	Pasar Pemerintah Kota 14 Pasar Pasar Swasta 6 Pasar
3.30.06.2.01.01.	Penyediaan dan Peneliharaan Sarana Metrologi Legal	Paket	Jumlah Paket Penyediaan dan Peneliharaan Sarana Metrologi Legal	Proses Bisnis	4 Paket	2 Paket	3 Paket	3 Paket	12 Paket	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	274.500.000	UPTD Metrologi	UPTD Metrologi dan Penyedia	Pembelian Alat Standar dan Pendukung 2 Paket Peneliharaan Flowmeter 1 Paket Peneliharaan Instalasi Meter Air 1 Paket Peneliharaan Lab Pengujian Rulin 8 Paket
	UPT PASAR PAQI													

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rencana Aksi	Output		Aspek Tata Kelola	Target				Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah/ Unit Kerja / Bagian		Keterangan	
		Satuan	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV			Total	Koordinator		Stakeholder
3.30.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Diebutusi Perdagangan													
1	Penarikan Retribusi Pasar Pagi	Rupiah	Jumlah Penarikan Retribusi dibawah Koordinasi UPT Pasar Pagi	Proses Berle	865861250	865861250	865861250	865861250	Langsung terkait dengan masyarakat	194.174.000	UPT PASAR PAGI	Pengelola Pasar	Pengelolaan pasar rakyat dengan penarikan retribusi pasar	
										194.174.000	237.277.000	81,83%	Anggaran Untuk Rencana Aksi	

Dari tabel diatas dan Setelah melakukan pemetaan rencana aksi didapati rata - rata belanja yang dianggarkan 91,7% untuk rencana aksi, sisanya untuk pendukung honor pengelola keuangan dan belanja yang tidak terkait. Maka masih dianggap wajar dan sesuai peruntukkan dimana Batasan penganggaran untuk honor pengelola keuangan sebesar maksimal 10% dari total pagu anggaran kegiatan.

e. Rencana Aksi RB Tematik

RB Tematik atau Reformasi Birokrasi Tematik adalah upaya untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan masyarakat. RB Tematik merupakan salah satu fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian dampak agenda prioritas pembangunan nasional. RB Tematik memiliki beberapa tema pelaksanaan, di antaranya: Penguatan kemiskinan, Peningkatan investasi, Digitalisasi administrasi pemerintahan, Percepatan prioritas aktual Presiden.

RB Tematik perlu dilaksanakan untuk menjadi daya ungkit dan akselerator tercapainya tujuan pembangunan nasional. Untuk itu Dinas Perdagangan Kota Samarinda Menyusun Rencana Aksi RB Tematik sesuai dengan Tupoksinya pada Tema Inflasi dan P3DN.

Tabel 5.4

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025

Tema	Rencana aksi	Output		Aspek Tata Kelola	Target					Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah/ Unit Kerja		Keterangan
		Satuan	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
Pengendalian Inflasi	1 Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok pada 11 pasar rakyat dan distributor	Laporan	Laporan Pemantauan harga barang kebutuhan pokok	Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	Langsung terkait dengan masyarakat	144.802.000	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Pemantauan harga di Pasar Rakyat Setiap Hari Senin sampai Jumat dan Stok setiap minggu
	2 Kegiatan Operasi Pasar (OP)	Kegiatan	Jumlah Terselenggaranya Operasi Pasar (OP)	Pengawasan	1 kegiatan				1 kegiatan	Langsung terkait dengan masyarakat	-	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Perusa Vira Niaga dan Bulog	Melaksanakan Operasi pasar pada kebutuhan barang pokok yang mengalami gejolak harga
	3 Kegiatan Pasar Murah	Lokasi	Jumlah Terselenggaranya Pasar Murah	Inovasi	9 lokasi	-	-	-	9 lokasi	Langsung terkait dengan masyarakat	170.445.000	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Dinas Perdagangan Kota Samarinda, retail dan distributor	Melaksanakan Pasar Murah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
	4 Stok Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional	Kegiatan	Jumlah Terselenggaranya Stok Pemantauan Harga dan Stok	Pengawasan	1 Kegiatan				1 Kegiatan	Langsung terkait dengan masyarakat	-	Bagian Perencanaan	Seluruh Tim TPID	Melaksanakan Stok Harga dan Stok pada pasar rakyat dan distributor barang kebutuhan pokok dan barang penting
	5 Pengawasan Harga eceran Tertinggi dan Ketersediaan LPG Bersubsidi di Tingkat Agen dan Pengaliran	Laporan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Ketersediaan Gas Bersubsidi di SPPE, Tingkat Agen dan Pengaliran	Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	Langsung terkait dengan masyarakat	-	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Dinas Perdagangan Kota Samarinda Pertamina	Pengawasan terhadap Gas Bersubsidi
	6 Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok pada 11 Pasar Rakyat melalui website www.ditdag.samarindk.go.id	Bulan	Update Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Teknologi Informasi	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	Langsung terkait dengan masyarakat	-	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Menyampaikan informasi harga barang kebutuhan pokok melalui website resmi dinas perdagangan setiap hari kerja
	7 Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Laporan	Laporan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	Langsung terkait dengan masyarakat	30.000.000	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Distributor ke Koa Tani
Tema	Rencana aksi	Output	Aspek Tata Kelola	Target					Jenis Kegiatan Rencana Aksi	Jumlah Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah/ Unit Kerja		Keterangan	

Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Pelaksanaan BLENIA Matching PDN	Satuan Kegiatan	Indikator Terlaksananya promosi/ perolehan dan blenia matching PSDN	Proses Blenia	TW I	TW II	TW III	TW IV	1 Kali kegiatan	Terkait Langsung Masyarakat	Koordinator Dinas Perdagangan	Pelaksana Dinas Perdagangan	Memfasilitasi UMKM lokal kepada Pelaku Usaha Ritel dan Perhotelan dalam pemasaran produk
--------------------------------------	---------------------------------	-----------------	---	---------------	------	-------	--------	-------	-----------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--

f. Crosscutting Rencana Aksi

Crosscutting antar kinerja adalah hubungan kinerja dan aktivitas antar bidang, tugas, atau fungsi dalam mewujudkan kinerja organisasi. Dalam mencapai target kinerja, dibutuhkan peran dari berbagai bidang yang menjalankan fungsi berbeda. Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan Program Prioritas Dinas Perdagangan membutuhkan peran serta dari stakeholder lain diluar / lintas bidang/instansi.

Kontribusi / peran serta dibutuhkan dari lintas perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perumda, Dan Juga Pelaku Usaha di Wilayah Kota Samarinda. Dinas Perdagangan Menyusun Crosscutting Rencana Aksi untuk mendukung program dan kegiatan pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.5
CROSSCUTTING RENCANA AKSI DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025

Sasaran Daerah	SASARAN STRATEGIS RENSTRA PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI	STAKEHOLDER	FASILITASI LINTAS STAKEHOLDER
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik	Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1 Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan	Disperindagkop Kaltim, Bapperida, BPKAD, Inspektorat Serta OPD Terkait	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen
					Penyediaan Gaji, Tunjangan serta pelaporan keuangan	Bapperida, BPKAD, Inspektorat	Penyediaan Anggaran dan Pelaporan
					Pelaporan Retribusi Daerah	Bapperida, Bapenda, BPKAD, Inspektorat	Pelaporan Retribusi Daerah Bidang perdagangan
					Penyediaan Jasa pelayanan umum	Bapperida, BPKAD, Inspektorat	Penyediaan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Bapperida, BPKAD, Inspektorat	Penyediaan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan
MENINGKATNYA PEMBANGUNAN SEKTOR TERSIER	MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS PERDAGANGAN DALAM NEGERI		2 Penciptaan pasar dan kemitraan serta promosi terhadap pelaku usaha / UMKM Kota Samarinda dalam rangka menciptakan komoditi unggulan untuk konsumsi dalam negeri hingga Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pameran Dagang nasional	UMKM Kota Samarinda	Produk yang di Promosikan
						BP2TSP Kota Samarinda	Fasilitas Stand dan Dekorasi
						Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Samarinda	Dekranasda dan pelaku IKM
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN	Business matching (Penciptaan pasar)	Pelaku Usaha retail Kota Samarinda	Kurasi dan Pemasaran Produk
						BPBJ Setkot Samarinda	Fasilitas E Catalog

Sasaran Daerah	SASARAN STRATEGIS RENSTRA PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI	STAKEHOLDER	FASILITASI LINTAS STAKEHOLDER	
			Pembangunan dan Revitalisasi serta optimalisasi sarana dan prasarana perdagangan kearah modern dan ber SNI 3	PRODUK DALAM NEGERI		Diskominfo Kota Samarinda	Fasilitasi E Commerce	
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Promosi	UMKM Kota Samarinda	Produk yang di Promosikan	
					Fasilitasi Perizinan Pelaku Usaha	BP2TSP Kota samarinda	Perizinan Pelaku Usaha	
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Menuju SNI	Dinas PUPR Kota samarinda	Pembangunan dan Tenaga teknis
				Kementrian Perdagangan RI, UPT BPSMB Prov Kaltim, BPOM Kota Samarinda, Labkesda Provinsi Kaltim dan Forkot Samarinda			Pendampingan serta pemenuhan Persyaratan menuju SNI pasar	
				Kodim 0901 , Polresta , Sekretariat, Bapperida , Satpol PP, Bagian Hukum , Unsur Kecamatan dan kelurahan Kota Samarinda			Tim penyiapan, Pelaksanaan dan pemantauan Relokasi Pedagang Pasar pagi	
				Pengawasan pengelolaan Pasar rakyat		Satpol PP dan Dishub Kota samarinda	Pengawasan Oeprasional Pasar Rakyat Terutama pasar Segiri	
						Dinas Lingkungan hidup Kota Samarinda	Kebersihan Pasar Segiri	

Sasaran Daerah	SASARAN STRATEGIS RENSTRA PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI	STAKEHOLDER	FASILITASI LINTAS STAKEHOLDER
<i>Indikator Tujuan</i>	Indikator Sasaran		4 Pengembangan jaringan distribusi yang efektif, operasi pasar, serta pengawasan terhadap Peredaran Minuman Beralkohol, BDKT, Tera Ulang UTTP, Pupuk Bersubsidi dan Barang Berbahaya dalam rangka meningkatkan pengamanan perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengawasan Bapokting	Kodim 0901 Samarinda, Satgas Pangan Polri, Dinas Kelapaangani dan Bagian Ekonomi Kota Samarinda	Pengawasan Gejolak harga
					Pasar Murah Reguler	Diskum Kota Samarinda, Bulog, Retail dan Perumda Varia Niaga Kota Samarinda	Penyediaan Produk Pasar Murah
					Operasi Pasar	Bulog Samarinda	Penyediaan komoditi Operasi pasar
					Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Dinas Kelapaangani Samarinda, Distributor Pupuk (PPI) dan Kios Tani	Data RDKK, Alokasi dan Penyaluran Pupuk bersubsidi
Target 2025 : 8,3%	Target 2025 : 17,47%			PROGRAM DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Pengawasan Peredaran Minol	BP2TSP, Satpol PP, Bagian Hukum Sekretariat, BPOM Kota Samarinda	Tim Terpadu Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Sidang Tera - Tera Ulang	Pengelola dan Pihak Keamanan Pasar	Mengawal Sidang Tera - Tera Ulang
					Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrotlogian	Pelaku Usaha	Membantu Pengawasan terhadap BDKT

VI. PENUTUP

a. Kesimpulan

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Dinas Perdagangan Kota Samarinda merupakan komitmen kami dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam INPRES RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap OPD khususnya Dinas Perdagangan Kota Samarinda, sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/05/M.PAN/3/2004 tanggal 17 Maret 2004 perihal Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sebagai bagian penutup dari Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Dinas Perdagangan Kota Samarinda, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perdagangan Kota Samarinda telah merencanakan sasaran dan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini, tepatnya 5 (lima) program yang menjadi prioritas, 1 (satu) Program Rutin dan 1 (satu) Program Pendukung sebagai bagian dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Namun demikian, disadari bahwa apa yang belum tercapai dan terlaksana selama tahun 2024 yang lalu kami yakini untuk dapat memperbaikinya di tahun 2025 ini.

b. Prioritas Tahun 2025

Sebagai bentuk keseriusan Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam memfokuskan pada sasaran terhadap perencanaan yang telah ditetapkan, maka kami akan melakukan upaya-upaya yang menjadi prioritas pada tahun anggaran 2025 diantara lain :

- 1) Lanjutan Pembangunan Pasar Buah jl. Merdeka
- 2) Peningkatan pengelolaan sampah pasar segiri dengan mengadakan 3 Unit Truck Sampah dan area workshop dalam mendukung pengelolaan sampah tersebut

- 3) Pemantauan harga dan stok serta operasi pasar dalam mendukung Tim TPID dalam menekan laju inflasi Kota Samarinda
- 4) Peningkatan kemitraan UMKM dengan pelaku usaha retail melalui Promosi dan Bisnis Matching
- 5) Peningkatan promosi dagang nasional dalam meningkatkan citra produk ekspor kota samarinda
- 6) Peningkatan pengamanan perdagangan melalui pengawasan alat UTTP di Kota Samarinda dalam rangka mewujudkan samarinda sebagai daerah tertib ukur Kembali.
- 7) Penyusunan naskah akademik relevansi nomenklatur Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam rangka Perbaikan Dokumen SAKIP Dinas Perdagangan
- 8) Peningkatan SDM aparatur

Akhir kata, semoga Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2025 ini dapat berguna bagi semua stakeholder yang berkompeten dan terutama bagi Lembaga pengawas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Kota Samarinda, sehingga prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya control dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Dengan harapan Pemerintah Kota Samarinda benar-benar dapat menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang mengedepankan prinsip - prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.

Samarinda, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda



NURRAHMANI, S.IP, MM
NIP. 196903011990032003

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

Sasaran Daerah		Indikator				Target 2025							
Meningkatnya pembangunan sektor tersier		Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB				8,30%							
Sasaran Strategis Dinas Perdagangan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan	Rumus / Persamaan			2022		2023		2024		2025
							Target RENSTRA	16,34	Target RENSTRA	16,56	Target RENSTRA	16,34	
Meningkatnya Produktifitas perdagangan dalam negeri	Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha	%	Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dibagi PDRB Kota Samarinda	Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha PDRB Kota Samarinda	÷	x100	8.621.093,88		9.327.610,00		Target RENSTRA 16,56		
							= 17,47%		= 17,40%		Target 2024 17,45	Target 2025 17,47%	
							49.342.390,41		53.604.330,00				

Melihat trend capaian realisasi dari 3 tahun terakhir dari Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dimana Kontribusi yang dihasilkan rata - rata 17,43% dan target tahun 2024 17,45% maka target IKU pada Matrik Revisi RENSTRA Dinas Perdagangan Tahun 2016 - 2021 perlu ditingkatkan dan menetapkan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kota Samarinda Tahun 2024 sebesar : 17,47%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Kota Samarinda	:	Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha
Target Tahun 2025	:	17,47% (Sumber data BPS)

Untuk selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan dan Perjanjian Kinerja

KERTAS KERJA PENILAIAN INDIKATOR SMART

TUJUAN/SASARAN/IKU NERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KRITERIA IKU							
		SPESIFIK		MEASURABLE/TERUKUR		ACHIEFABLE/DAPAT DICAPAI		RELEVAN	
Meningkatnya Produktifitas perdagangan dalam negeri	Presentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha	Y	1	Y	1	Y	1	Y	1
			100,00%		100,00%		100,00%		100,00%

Samarinda, 31 Januari 2025
 Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda

NURRAHMANI, S.IP, MM
 NIP. 196903011990032003

INDIKATOR KINERJA KUNCI
DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Indikator Outcome / Output	Target Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja				Penanggung jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
			K	K	K	K	
1	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	54,05	8,11	10,81	16,22	18,92	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
1.1	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan Sarana Perdagangan Selain Gudang	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Ketua Tim Kerja Pelaku Distribusi
1.2	Persentase Gudang Yang Tidak Memiliki TDG	59,54	0,00	0,00	0,00	59,54	
1.3	Persentase TDG	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
1.4	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	Kepala Bidang Sarana Perdagangan
2	Presentase kinerja realisasi pupuk	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
2.1	Presentase jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	Ketua Tim Kerja Pengendalian Barang Pokok dan Penting
3	Presentase Koefisien variasi harga antar waktu	<10	0,00	0,00	0,00	10,00	Ketua Tim Kerja Pengendalian Barang Pokok dan Penting
4	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	54,03	0,00	0,00	0,00	54,03	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
4.1	Persentase alat - alat UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun berjalan	51,44	1,82	18,21	20,04	11,37	Kepala UPT Metrologi
4.2	Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017)	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	Ketua Tim Kerja Kemetrolgian dan tertib niaga

Samarinda, 31 Januari 2025

 Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda 

NURRAHMANI, S.IP, MM
NIP.196903011990032003

PENGUKURAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jabatan Penanggung Jawab	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator (KU / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Target Kinerja Tahun 2025	Satuan target	Pagu Anggaran (Rp)	Target Kinerja				Target Keuangan				Total Target keuangan Tahun 2025	Penanggung jawab
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
							K	K	K	K	Rp	Rp	Rp	Rp		
30.03	Eselon III	URUSAN PERDAGANGAN	Presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha	17,47	Persen	53.796.689.793	0	0	0	17,47	12.433.742.534	15.146.855.957	12.954.268.829	10.543.588.273	51.050.295.193	Kepala Dinas
1	Eselon III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI IKM	88	Nilai	34.001.035.929	0	0	0	88	8.656.995.335	7.913.987.485	7.515.019.010	7.212.481.893	32.300.884.133	Sekretaris
1.1	Eselon IV	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP	76	Nilai	300.000.000	0	76	0	0	129.484.000	77.198.000	37.580.000	40.780.000	285.056.000	Kasubbag Program dan Keuangan
1.1.1	Eselon IV	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17	Dokumen	150.000.000	6	3	8	0	44.134.000	59.946.000	22.000.000	16.420.000	142.500.000	PPTK
1.1.2	Eselon IV	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	50.000.000	1	0	0	2	20.750.000	7.480.000	7.480.000	11.790.000	47.500.000	PPTK
1.1.3	Eselon IV	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	50.000.000	1	1	1	1	18.730.000	8.100.000	8.100.000	12.570.000	47.500.000	PPTK
1.1.4	Eselon IV	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Berita Acara	50.000.000	0	2	0	0	45.870.000	1.630.000	-	-	47.500.000	PPTK
1.2	Eselon IV	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7	Laporan	21.113.054.138	0	0	0	7	6.242.769.231	5.614.299.206	4.606.934.400	3.573.398.600	20.057.401.431	Kasubbag Program dan Keuangan
1.2.1	Eselon IV	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	80	Orang/bulan	13.886.080.670	0	0	0	80	3.695.164.869	4.124.219.200	3.093.164.400	2.062.109.557	13.174.657.626	PPTK
1.2.2	Eselon IV	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	7.194.993.288	0	0	0	1	2.323.104.562	1.503.000.000	1.503.000.000	1.506.139.043	6.835.243.605	PPTK
1.2.3	Eselon IV	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	50.000.000	1	1	1	1	24.500.000	7.080.000	10.770.000	5.150.000	47.500.000	PPTK
1.3	Eselon IV	Administrasi Pendapatan Daerah Kawenangan Perangkat Daerah	Jenis Retribusi	3	Jenis	59.980.969	0	0	0	3	34.180.000	2.950.000	2.950.000	7.420.000	47.500.000	Kasubbag Program dan Keuangan
1.3.1	Eselon IV	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Dokumen	50.000.000	3	3	3	3	34.180.000	2.950.000	2.950.000	7.420.000	47.500.000	PPTK
1.4	Eselon IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1	Laporan	665.781.300	0	0	0	1	420.382.534	112.214.761	30.150.000	88.745.000	651.492.235	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.1	Eselon IV	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2.705.000	0	0	2	0	2.540.800	30.100	-	-	2.570.700	PPTK
1.4.2	Eselon IV	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	124.931.000	0	5	0	0	79.684.450	39.000.000	-	-	118.684.450	PPTK
1.4.3	Eselon IV	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	137.440.000	0	0	0	2	53.128.000	40.000.000	25.200.000	12.240.000	130.568.000	PPTK
1.4.4	Eselon IV	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	49.593.500	1	0	3	0	33.233.625	3.300.000	4.950.000	5.630.000	47.113.625	PPTK
1.4.5	Eselon IV	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	271.112.000	3	3	3	1	206.725.799	22.684.601	-	26.145.000	257.556.400	PPTK
1.4.6	Eselon IV	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	99.996.500	0	0	0	1	43.088.950	7.200.000	-	44.730.000	94.996.950	PPTK
1.5	Eselon IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	1	Laporan	8.113.582.116	0	0	0	1	2.040.114.895	1.086.984.000	1.907.164.116	2.673.640.000	7.707.903.011	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.5.1	Eselon IV	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	2.071.352.116	0	0	0	1	213.232.395	316.800.000	544.368.116	893.364.000	1.967.784.511	PPTK
1.5.2	Eselon IV	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	6.042.230.000	0	0	0	1	1.826.862.500	770.184.000	1.362.775.000	1.780.276.000	5.740.118.500	PPTK
1.6	Eselon IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	1	Laporan	3.736.618.378	0	0	0	1	791.964.675	1.006.383.594	930.841.094	628.459.093	3.551.687.456	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.6.1	Eselon IV	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	281.536.000	0	0	0	11	119.718.200	-	120.043.000	27.700.000	267.459.200	PPTK
1.6.2	Eselon IV	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	Unit	3.203.192.375	0	0	0	50	640.638.475	800.798.094	800.798.094	800.798.093	3.043.032.756	PPTK
1.6.3	Eselon IV	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	Unit	43.800.000	0	0	0	90	31.610.000	-	10.000.000	-	41.610.000	PPTK
1.6.4	Eselon IV	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2	Unit	210.090.000	0	2	0	0	0	199.585.500	-	-	199.585.500	PPTK
2	Eselon III	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (UPP/BIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/UTS/BIUP Toko Swalayan)	94,05	Persen	400.934.350	5,11	10,81	16,22	16,92	60.140.152	153.357.368	140.577.805	26.812.487	380.887.632	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
2.1	JF (Penyetaraan)	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan Barasra Perdagangan Selain Gudang	100	Persen	54.636.350	25	25	25	25	8.195.452	20.598.403	19.156.870	3.653.807	51.904.532	Ketua Tim Kerja Pelaku Distribusi

No	Jabatan Penanggung Jawab	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator IKU / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2025	Satuan target	Pagu Anggaran (Rp)	Target Kinerja				Target Keuangan				Total Target keuangan Tahun 2025	Penanggung Jawab
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
							K	K	K	K	Rp	Rp	Rp	Rp		
2.1.2	JF (Penyetaan) / Ketua Tim	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	Dokumen	54.636.350	15	20	30	35	8.195.452	20.998.403	19.156.870	3.653.907	51.904.532	PPTK
2.2	JF (Penyetaan)	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Presentase Gudang Yang Tidak Memiliki TDG	98,54	Persen	97.988.000	0	0	0	98,54	14.696.200	37.480.410	34.357.042	6.552.948	93.086.600	Ketua Tim Kerja Pelaku Distribusi
			Presentase TDG	100	Persen		25	25	25	25						
2.3.1	JF (Penyetaan) / Ketua Tim	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	14	Dokumen	97.988.000	3	3	3	5	14.696.200	37.480.410	34.357.042	6.552.948	93.086.600	PPTK
2.3	JF (Penyetaan)	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin Minol Golongan B dan C	15	Dokumen	248.310.000	2	3	3	7	37.246.500	94.978.575	87.063.893	16.605.732	235.894.500	Ketua Tim Kerja Pelaku Distribusi
2.3.1	JF (Penyetaan) / Ketua Tim	Facilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15	Dokumen	248.310.000	2	3	3	7	37.246.500	94.978.575	87.063.893	16.605.732	235.894.500	PPTK
3	Eselon III	PROGRAM PENINGKATAN BARANG DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kabupaten	15	Persen	16.826.935.014	0	0	0	15	2.295.407.507	6.247.821.299	4.488.729.364	2.953.630.093	15.955.588.263	Kepala Bidang Barana Perdagangan
3.1	JF (Penyetaan)	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi yang dikelola dan dikembangkan	15	Unit	16.258.950.614	0	0	0	15	2.052.996.707	6.114.248.069	4.408.678.364	2.870.078.943	15.448.003.083	Ketua Tim Kerja Pengembangan Barana
3.1.1	JF (Penyetaan) / Ketua Tim	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5	Unit	13.686.644.714	0	0	2	3	2.052.996.707	4.105.993.414	4.105.993.414	2.737.328.943	13.002.312.478	PPTK
3.1.2	JF (Penyetaan) / Ketua Tim	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7	Unit	2.572.305.900	0	0	4	3	0	2.008.254.955	302.865.950	132.790.000	2.443.890.805	PPTK
3.2	JF (Penyetaan)	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Sarana distribusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang diawasi	15	Unit	867.964.400	0	0	0	15	242.410.800	133.573.230	80.080.000	83.581.180	539.585.180	Ketua Tim Kerja Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
3.2.1	JF (Penyetaan) / Ketua Tim	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2	Dokumen	100.000.000	0	0	0	2	15.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	95.000.000	PPTK
4	Eselon III	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	0,02	Nilai	315.247.000	0	0	0	0,02	149.298.200	66.364.160	42.510.800	41.311.700	299.484.650	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
			Presentase kinerja realisasi pupuk	70	Persen	30.000.000	0	0	0	70	1.915.200	13.178.400	7.680.800	5.745.600	28.500.000	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
4.1	JF (Penyetaan)	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Presentase Koefisien variasi harga antar waktu	<10	Nilai	315.247.000	0	0	0	10	149.298.200	66.364.160	42.510.800	41.311.700	299.484.650	Ketua Tim Kerja Pengendalian Barang Pokok dan Penting
4.1.1	JF (Penyetaan) / Ketua Tim	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4	Laporan	144.802.000	1	1	1	1	18.331.200	35.408.400	42.510.800	41.311.700	137.561.900	PPTK
4.1.2	JF (Penyetaan) / Ketua Tim	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	9	Laporan	170.445.000	0	0	0	0	130.967.000	30.955.750	-	-	161.922.750	PPTK
4.2	JF (Penyetaan)	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	75	Persen	30.000.000	0	0	0	75	1.915.200	13.178.400	7.680.800	5.745.600	28.500.000	Ketua Tim Kerja Pengendalian Barang Pokok dan Penting
4.2.1	JF (Penyetaan) / Ketua Tim	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4	Laporan	30.000.000	1	1	1	1	1.915.200	13.178.400	7.680.800	5.745.600	28.500.000	PPTK
5	Eselon III	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)	\$134,51	Juta\$	313.614.000	0	0	0	\$134,51	62.772.000	85.841.300	119.430.000	30.090.000	297.933.300	Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor
5.1	JF (Penyetaan)	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)	20	Pelaku Usaha	313.614.000	0	0	0	20	62.772.000	85.841.300	119.430.000	30.090.000	297.933.300	Ketua Tim Kerja Pengembangan Ekspor
5.1.1	JF (Penyetaan) / Ketua Tim	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3	Pelaku Usaha	266.780.000	0	1	1	1	62.772.000	44.320.000	119.430.000	26.900.000	263.422.000	PPTK
5.1.2	JF (Penyetaan) / Ketua Tim	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	1	Pelaku Usaha	46.834.000	0	1	0	0	0	41.321.300	-	3.190.000	44.511.300	PPTK
6	Eselon III	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat UTPP bertanda tera sah yang berlaku	54,03	Persen	1.619.502.000	0	0	0	54,03	174.311.175	515.288.925	591.341.650	287.585.150	1.538.526.900	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
6.1	JF (Penyetaan)	Pelaksanaan Metrologi Legal, Serupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Permendag No. 26/M-DAQ/PER/5/2017)	75	Persen	645.575.000	0	0	0	75	28.222.125	223.110.825	299.163.550	62.799.750	613.295.250	Ketua Tim Kerja Kametrololan dan terbit nlaa
6.1.2	JF (Penyetaan) / Ketua Tim	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Ditang	1500	Orang	645.575.000	58	608	633	201	28.222.125	223.110.825	299.163.550	62.799.750	613.295.250	PPTK
7	Eselon III	PROGRAM PENGUNJUKAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah UMKM yang bermitra dengan Pelaku Usaha	25	UMKM	291.421.500	0	0	0	25	32.918.165	106.195.000	56.060.000	21.677.180	276.850.315	Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor
7.1	JF Penyetaan	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Media Promosi	3	Media	291.421.500	1	1	1	0	32.918.165	106.195.000	56.060.000	21.677.180	276.850.315	Ketua Tim Kerja P3DN

No	Jabatan Penanggung Jawab	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator IKU / Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2025	Satuan target	Pagu Anggaran (Rp)	Target Kinerja				Target Keuangan					Total Target keuangan Tahun 2025	Penanggung jawab
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV			
							K	K	K	K	Rp	Rp	Rp	Rp			
7.1.1	JF (Penyeteraan) / Ketua Tim	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50	UMKM	238.777.000	0	0	0	50	32.661.000	154.000.000	18.500.000	21.677.150	228.838.150	PPTK	
7.1.2	JF (Penyeteraan) / Ketua Tim	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50	UMKM	52.844.500	0	0	50	0	267.165	12.195.000	37.590.000		50.012.165	PPTK	
		UPTD Pasar Segiri (Wil 2)															
3.2.2	Eselon IV	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8	Dokumen	230.707.400	0	0	0	8	112.716.800	77.923.230	3.900.000	24.630.000	219.172.030	Kepala UPT Pasar Segiri	
		UPT Metrologi															
6.1	Eselon IV	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Penawasaan	Persentase alat - alat UTPP yang ditera / tera ulang pada tahun berjalan	51,44	Persen	973.927.000	1,82	18,31	20,64	11,37	146.089.090	292.178.100	292.178.100	194.785.400	925.230.650	Kepala UPT Metrologi	
6.1.1	Eselon IV	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Pertimbangan Ditara Ulang	5648	Unit	973.927.000	200	2000	2200	1248	146.089.090	292.178.100	292.178.100	194.785.400	925.230.690	Kepala UPT Metrologi	
		UPTD Pasar Pagi (Wilayah 1)															
3.2.2	Eselon IV	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7	Dokumen	237.277.000	0	0	0	7	114.692.000	28.950.000	46.150.000	38.921.150	225.413.150	Kepala UPT Pasar Pagi	

Samarinda, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda

NURRAHMANI, S.I.P, MM
NIP. 196903011990032003

RENCANA AKSI KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan / Rencana Aksi	Output		Aspek Tata Kelola	Target					Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah/ Unit Kerja / Bagian		Keterangan
		Satuan	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Stakeholder	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.30	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA										18.124.422.184	20.297.652.864	94,22%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										410.218.800	499.998.800	82,04%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										226.740.000	300.000.000	75,58%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										135.000.000	150.000.000	90,00%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.01.0001.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	Perencanaan & Penganggaran	6	3	8	0	17	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	135.000.000	Sekretariat Dinas Perdagangan	Bappepda, BPKAD, dan Dinas Perdagangan (Subbag Program dan keuangan)	Penyusunan Dokumen RENSTRA, RENJA N+1, P-RENJA, RKT, PK, Manajemen Risiko dan Pengendalian
3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										45.870.000	50.000.000	91,74%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.01.0006.1	Evaluasi dan Updating Capaian Kinerja SKPD	Laporan	Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	Perencanaan & Penganggaran	1	1	1	1	4	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	45.870.000	Sekretariat Dinas Perdagangan	Bappepda, BPKAD, Inspektorat dan Dinas Perdagangan (Subbag Program dan keuangan)	Evaluasi Renc Peringkat Daerah
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										45.870.000	50.000.000	91,74%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan & Penganggaran	1	1	1	1	4	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	45.870.000	Sekretariat Dinas Perdagangan	Bappepda, BPKAD, Inspektorat dan Dinas Perdagangan (Subbag Program dan keuangan)	Penyusunan LAKIP dan Pelaporan E Tepian dan E Monev
3.30.01.2.01.0010.1	Pelaksanaan Forum PO Bidang Perdagangan	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Forum Perangkat Daerah	Perencanaan & Penganggaran	0	2	0	0	2	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	45.870.000	Sekretariat Dinas Perdagangan	Instansi / Stakeholder terkait	Forum Bidang Perdagangan dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan
3.30.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										45.870.000	50.000.000	91,74%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										45.870.000	50.000.000	91,74%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.02.0005.1	Pelaporan Realisasi Anggaran	Laporan	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Perhitungan	Perencanaan & Penganggaran	1	1	1	1	4	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	45.870.000	Sekretariat Dinas Perdagangan	Bappepda, BPKAD, Inspektorat dan Dinas Perdagangan (Subbag Program dan keuangan)	Pelaporan Realisasi keuangan
3.30.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										45.870.000	50.000.000	91,74%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah										45.870.000	50.000.000	91,74%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.04.0007.1	Pelaporan Capaian Retribusi Bidang Perdagangan	Laporan	Jumlah Laporan Realisasi Capaian Retribusi	Perencanaan & Penganggaran	3	3	3	3	12	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	45.870.000	Sekretariat Dinas Perdagangan	Bappepda, BPKAD, Inspektorat, Bappepda dan Dinas Perdagangan (Subbag Program dan keuangan)	Laporan Retribusi Bidang perdagangan
3.30.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah										91.738.800	99.998.800	91,74%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										91.738.800	99.998.800	91,74%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.06.0011.1	Pengembangan Website Resmi Dinas Perdagangan	Bulan	Jumlah Bulan upload data Harga dan Stok pada Sistem Informasi Perdagangan	Teknologi Informasi	3	3	3	3	12	Langsung terkait dengan masyarakat	76.738.800	Sekretariat Dinas Perdagangan	Bappepda, BPKAD, Diskominfo dan Dinas Perdagangan (Subbag Program dan keuangan)	Pemeliharaan dan Pengembangan Data dan Informasi via Website : Disdag.samarindakota.go.id
3.30.01.2.06.0011.2	Pemeliharaan Jaringan Dinas Perdagangan	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Jaringan	Teknologi Informasi	0	0	0	1	1	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	15.000.000	Sekretariat Dinas Perdagangan	Bappepda, BPKAD, Diskominfo dan Dinas Perdagangan (Subbag Program dan keuangan)	Pemeliharaan jaringan internet Dinas Perdagangan
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										5.920.550.000	6.042.230.000	97,99%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										5.920.550.000	6.042.230.000	97,99%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.01.2.08.0004.1	Pengadaan Tenaga Outsourcing	Orang/Bulan	Jumlah tenaga Outsourcing Bidang Perdagangan	SDM	342	342	407	537	1628	Langsung terkait dengan masyarakat	5.920.550.000	Sekretariat Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Penyedia Jasa	Tenaga Outsourcing Kebersihan, keamanan, Sopir dan supporting Aplikasi
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN										364.302.350	400.934.350	90,86%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.02.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan										51.856.350	54.636.350	105,36%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										51.856.350	54.636.350	105,36%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.02.2.01.0001.1	Memberikan fasilitas penerbitan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Dokumen	Jumlah Dokumen Perizinan dan Rekomendasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Proses Bisnis	15	20	30	56	100	Langsung terkait dengan masyarakat	7.065.350	Bidang Perdagangan Dalam negeri	DISDAG, BP2TSP dan Pelaku Usaha	Fasilitasi perizinan Pasar rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan
3.30.02.2.01.0001.2	Memberikan Surat Keterangan Tempat Usaha Berjalan bagi pedagang Pasar	SKTUB	Jumlah SKTUB	Proses Bisnis	500	500	500	500	2000	Langsung terkait dengan masyarakat	44.791.000	Bidang Perdagangan Dalam negeri	DISDAG, BP2TSP dan Pelaku Usaha	Fasilitasi perizinan pedagang pasar rakyat
3.30.02.2.02	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang										78.206.000	97.988.000	79,81%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang										78.206.000	97.988.000	79,81%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.02.2.02.0001.1	Memfasilitasi Terbitnya Tanda Daftar Gudang	Dokumen	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Proses Bisnis	3	3	3	5	14	Langsung terkait dengan masyarakat	71.424.000	Bidang Perdagangan Dalam negeri	DISDAG, BP2TSP dan Pelaku Usaha	Fasilitasi perizinan Gudang
3.30.02.2.02.0001.2	Pengawasan terhadap TDG	Laporan	Jumlah Laporan	Pengawasan	10	10	10	9	39	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	6.785.000	Bidang Perdagangan Dalam negeri	DISDAG, BP2TSP dan Pelaku Usaha	Pengawasan gudang di Kota Samarinda
3.30.02.2.05	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengedar dan Penjual Langsung Minum di Tempat										234.237.800	248.310.000	94,33%	Anggaran Untuk Rencana Aksi

RENCANA AKSI KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan / Rencana Aksi	Output		Aspek Tata Kelola	Target				Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah/ Unit Kerja / Bagian		Keterangan
		Satuan	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Stakeholder	
3.30.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitas Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C									234.237.000	248.310.000	94,33%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.02.2.02.0001.1	Memfasilitasi Terbitnya Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol	Dokumen	Jumlah Dokumen (tin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	Proses Bisnis	2	3	3	7	15	Langsung terkait dengan masyarakat	20.232.000	DISDAG, BP2TSP dan Pelaku Usaha	Facilitasi perdinan tempat usaha mindi
3.30.02.2.02.0001.2	Melakukan pengawasan dan pengendalian peneraian minuman beralkohol	Tempat usaha	Jumlah tempat usaha minuman beralkohol	Pengawasan	7	7	7	6	27	Langsung terkait dengan masyarakat	214.005.000	Bidang Perdagangan Dalam negeri DISDAG, BP2TSP, Tim Terpadu Pengawasan Minol dan Pelaku Usaha	Pengawasan tempat usaha minoi terhadap 17 penjual langsung dan 10 distributor
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									15.989.832.514	16.826.935.014	95,02%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									15.537.532.614	16.358.950.614	95,56%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.03.2.01.0001	Sub Kegiatan/Perencanaan Sarana Distribusi Perdagangan									13.096.780.714	13.686.644.714	95,70%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.03.2.01.0001.1	Pembangunan/Revitalisasi/Pengembangan Pasar Rakyat	Pasar	Jumlah Pasar yang Dibangun/revitalisasi	Proses Bisnis	0	0	1	1	2	Langsung terkait dengan masyarakat	8.694.410.000	Bidang Sarana Perdagangan	Pembangunan pasar buah dan revitalisasi pasar segiti
3.30.03.2.01.0001.2	Penyediaan Sarana Pasar Rakyat	Pasar	Jumlah Pasar Yang difasilitasi sarana	Proses Bisnis	0	0	0	2	2	Langsung terkait dengan masyarakat	4.404.370.714	Bidang Sarana Perdagangan	Penyediaan iPAL Pasar Merdeka dan Baqa
3.30.03.2.01.0001.3	Pemeliharaan Pasar Rakyat	Pasar	Jumlah Pasar Yang dipelihara	Proses Bisnis	0	0	1	0	1	Langsung terkait dengan masyarakat	225.000.000	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Pemeliharaan pasar Sungai Dame
3.30.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									2.438.251.800	2.572.305.900	94,79%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.03.2.01.0002.1	Facilitasi Pengelolaan Sarana Perdagangan Diluar Bangunan	Pasar	Jumlah Pasar Yang Di fasilitasi diluar Bangunan	Proses Bisnis	0	0	4	3	7	Langsung terkait dengan masyarakat	2.438.251.800	Bidang Sarana, UPT Pasar dan Pengelola Pasar	Facilitasi terhadap 7 pasar rakyat (CCTV, APAR, Alat Las, Komputer, Printer dan Alat kantor Lainnya
3.30.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya									451.999.900	567.864.490	79,58%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									86.562.500	100.000.000	86,56%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.03.2.02.0001.1	Pengawasan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Rupiah	Jumlah Retribusi Pasar rakyat	Proses Bisnis	2259825000	2259825000	2259825000	2259825000	9039300000	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	86.562.500	Bidang Sarana, UPT Pasar dan Pengelola Pasar	Pengawasan terhadap penarikan retribusi pasar rakyat
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING									315.727.000	345.247.000	91,48%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.04.2.02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota									285.727.000	313.247.000	90,84%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.04.2.02.0001	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan									131.862.000	144.802.000	90,94%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.04.2.02.0001.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada 10 Pasar Rakyat serta Distributor Barang Kebutuhan Pokok	Laporan	Terlaksananya Laporan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengawasan	1	1	1	1	4	Langsung terkait dengan masyarakat	131.862.000	Bidang Perdagangan Dalam negeri	Pengawasan terhadap Harga dan Stok Barang pokok khususnya makanan
3.30.04.2.02.0002	Sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									154.045.000	170.445.000	90,38%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.04.2.02.0002.1	Pelaksanaan Pasar Murah	Lokasi	Laporan Penyelenggaraan Pasar Murah	Pengawasan	9	0	0	0	9	Langsung terkait dengan masyarakat	154.045.000	Bidang Perdagangan Dalam negeri	DISDAG, RETAIL, PERUMDA dan Bulog
3.30.04.2.03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									30.000.000	30.000.000	100,00%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.04.2.03.0001	Sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersidi									30.000.000	30.000.000	100,00%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.04.2.03.0001.1	Pengawasan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersidi pada distributor pupuk dan Kios Tani	Laporan	Terlaksananya Laporan Pengawasan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi	Pengawasan	1	1	1	1	4	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	30.000.000	Bidang Perdagangan Dalam negeri	DISDAG, PERTANIAN, DISTRIBUTOR dan KIOS TANI
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR									287.394.000	313.614.000	91,64%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Milad Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									287.394.000	313.614.000	91,64%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.05.2.01.0001	Pameran Dagang Nasional									240.540.000	266.760.000	90,17%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.05.2.01.0001.1	Mengikuti Kegiatan Pameran/Expo Di Tingkat Nasional	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang Nasional	Proses Bisnis	0	2	1	0	3	Langsung terkait dengan masyarakat	240.540.000	Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor DISDAG Kota Samarinda, DISKUMI Kota Samarinda, DPMP2SP Kota Samarinda, DISPORAPAR Kota Samarinda dan Penyelenggara Event	Mengikuti/Melaksanakan Pameran pada Event : APEKSI di Surabaya, ITTAF di Palembang dan ITTAF di Lombok
3.30.05.2.01.0001.2	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal									46.854.000	46.854.000	100,00%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.05.2.01.0001.2.1	Mengikuti Kegiatan Pameran/Expo Di Dalam Wilayah Kota Samarinda Sebanyak 1 (Satu) Kali	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang Lokal	Proses Bisnis	0	1	0	0	1	Langsung terkait dengan masyarakat	46.854.000	Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor DPMP2SP Provinsi Kaltim dan Penyelenggara Event	Mengikuti pameran/expo dalam rangka HUT Pemprov Kaltim di Big Mall
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									1.499.942.000	1.619.502.000	92,62%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan									1.499.942.000	1.619.502.000	92,62%	Anggaran Untuk Rencana Aksi
3.30.06.2.01.0001	Sub Kegiatan Pengawasan/Perkukahan Metrologi Legal									568.825.000	645.575.000	91,21%	Anggaran Untuk Rencana Aksi

RENCANA AKSI KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan / Rencana Aksi	Output		Aspek Tata Kelola	Target					Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah/ Unit Kerja / Bagian		Keterangan
		Satuan	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Stakeholder	
3.30.06.2.01.0002	1 Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UUTP), BDKT dan Satuan Ukuran (SU)	Orang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pengawasan	57	345	530	199	1131	Langsung terkait dengan masyarakat	364.949.000	Bidang Perdagangan Dalam negeri	DISDAG, SPBU, SPPBE, Agen Gas dan Pelaku Usaha	Melakukan Pengawasan UUTP, BDKT, dan Satuan Ukuran
3.30.06.2.01.0002	2 Penyuluhan Metrologi Legal	Orang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	SDM	1	263	103	2	369	Langsung terkait dengan masyarakat	223.876.000	Bidang Perdagangan Dalam negeri	UPT Pasar, Pengelola dan Pelaku Usaha tentang Metrologi Legal	Melakukan Penyuluhan kepada Pelaku Usaha tentang Metrologi Legal
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI										257.805.596	291.421.500	88,46% Anggaran Untuk Rencana Aksi	
3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri										257.805.596	291.421.500	88,46% Anggaran Untuk Rencana Aksi	
3.30.05.2.01.0006	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota										205.161.000	238.777.000	85,92% Anggaran Untuk Rencana Aksi	
3.30.05.2.01.0005	1 Melaksanakan Promosi Penggunaan produk Dalam Negeri khususnya produk-produk dari UMKM lokal	Media	Jumlah Media Promosi	Proses Bisnis	1	1	1	0	3	Langsung terkait dengan masyarakat	205.161.000	Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	menggunakan Media Promosi Media Cetak, Elektronik dan Karanaval
3.30.07.2.01.0006	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota										52.644.500	52.644.500	100,00% Anggaran Untuk Rencana Aksi	
3.30.07.2.01.0006	1 Melakukan fasilitasi dalam hal kemitraan dengan ritel, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi lainnya	UMKM	Jumlah UMKM yang difasilitasi	Proses Bisnis	0	0	50	0	50	Langsung terkait dengan masyarakat	52.644.500	Bidang Promosi dan Pengembangan Ekspor	DISDAG dan Pelaku Usaha (Ritel dan Perhotelan)	Melaksanakan Bisnis Matching
UPT PASAR SEGIRI														
3.30.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan										169.263.400	230.707.400	73,37% Anggaran Untuk Rencana Aksi	
	1 Penarikan Retribusi	Rupiah	Jumlah Penarikan Retribusi dibawah Koordinasi UPT Pasar Segiri	Proses Bisnis	514472500	514472500	514472500	514472500	2067890000	Langsung terkait dengan masyarakat	169.263.400	UPT PASAR SEGIRI	Pengelola Pasar	Pengelolaan pasar rakyat dengan penarikan retribusi pasar
UPT METROLOGI LEGAL														
3.30.06.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Bersupa Tera, Tera Ulang										911.117.000	973.927.000	93,55% Anggaran Untuk Rencana Aksi	
3.30.06.2.01.01	1 Layanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UUTP)	Pasar	Jumlah Pasar Yang Di tera - tera Ulang	Proses Bisnis	0	9	11	0	20	Langsung terkait dengan masyarakat	636.617.000	UPTD Metrologi	UPTD Metrologi	Pasar Pemerintah Kota 14 Pasar Pasar Swasta 6 Pasar
3.30.06.2.01.01	2 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Metrologi Legal	Paket	Jumlah Paket Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Metrologi Legal	Proses Bisnis	4 Paket	2 Paket	3 Paket	3 Paket	12 Paket	Tidak langsung terkait dengan masyarakat	274.500.000	UPTD Metrologi	UPTD Metrologi dan Penyedia	Pembelian Alat Standar dan Pendukung 2 Paket Pemeliharaan Flowmeter 1 Paket Pemeliharaan instalasi Meter Air 1 Paket Pemeliharaan Lab Pengujian Rutin 6 Paket
UPT PASAR PAGI														
3.30.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan										194.174.000	237.277.000	81,83% Anggaran Untuk Rencana Aksi	
	1 Penarikan Retribusi	Rupiah	Jumlah Penarikan Retribusi dibawah Koordinasi UPT Pasar Pagi	Proses Bisnis	865861250	865861250	865861250	865861250	3463445000	Langsung terkait dengan masyarakat	194.174.000	UPT PASAR PAGI	Pengelola Pasar	Pengelolaan pasar rakyat dengan penarikan retribusi pasar

Keterangan : Setelah melakukan pemetaan rencana aksi didapati rata - rata belanja yang dianggarkan 91,7% untuk rencana aksi, sisanya untuk pendukung honor pengelola keuangan



USULAN RENCANA AKSI RB TEMATIK INFLASI DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

Tema	Rencana aksi		Output		Aspek Tata Kelola	Target					Jenis Kegiatan	Jumlah Anggaran	Perangkat Daerah/ Unit Kerja		Keterangan
			Satuan	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
1	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Pengendalian Inflasi	1	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok pada 11 pasar rakyat dan distributor	Laporan	Laporan Pemantauan harga barang kebutuhan pokok	Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	Langsung terkait dengan masyarakat	144.802.000	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Pemantauan harga di Pasar Rakyat Setiap Hari Senin sampai Jumat dan Stok setiap minggu
	2	Kegiatan Operasi Pasar (OP)	Kegiatan	Jumlah Terselenggaranya Operasi Pasar (OP)	Pengawasan	1 kegiatan				1 kegiatan	Langsung terkait dengan masyarakat	-	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Perusda Varia Niaga dan Bulog	Melaksanakan Operasi pasar pada kebutuhan barang pokok yang mengalami gejala harga
	3	Kegiatan Pasar Murah	Lokasi	Jumlah Terselenggaranya Pasar Murah	Inovasi	9 lokasi	-	-	-	9 lokasi	Langsung terkait dengan masyarakat	170.445.000	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Dinas Perdagangan Kota Samarinda, retail dan distributor	Melaksanakan Pasar Murah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
	4	Sidak Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional	Kegiatan	Jumlah Terselenggaranya Sidak Pemantauan Harga dan Stok	Pengawasan	1 Kegiatan	-	-		1 Kegiatan	Langsung terkait dengan masyarakat	-	Bagian Perekonomian	Seluruh Tim TPID	Melaksanakan Sidak Harga dan Stok pada pasar rakyat dan distributor barang kebutuhan pokok dan barang
	5	Pengawasan Harga eceran Tertinggi dan Ketersediaan LPG Bersubsidi di Tingkat Agen dan Pangkalan	Laporan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Ketersediaan Gas Bersubsidi di SPPBE, Tingkat Agen dan	Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	Langsung terkait dengan masyarakat	-	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Dinas Perdagangan Kota Samarinda Pertamina	Pengawasan terhadap Gas Bersubsidi
	6	Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok pada 11 Pasar Rakyat melalui website www.disdag.samarindakota.go.id	Bulan	Update Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Teknologi Informasi	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	Langsung terkait dengan masyarakat	-	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Menyampaikan informasi harga barang kebutuhan pokok melalui website resmi dinas perdagangan setiap hari kerja
	7	Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Laporan	Laporan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	Langsung terkait dengan masyarakat	30.000.000	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Distributor ke Kios Tani

Tema	Rencana aksi		Output		Aspek Tata Kelola	Target				Total	Jenis Kegiatan Rencana Aksi	Jumlah Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah/ Unit Kerja		Keterangan
			Satuan	Indikator		TW I	TW II	TW III	TW IV				Koordinator	Pelaksana	
Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Pelaksanaan Bisnis Matching PDN		Kegiatan	Terlaksananya promosi/ percepatan dan bisnis matching P3DN	Proses Bisnis	-	-	1	-	1 Kali kegiatan	Terkait Langsung Masyarakat	-	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	Memfasilitasi UMKM lokal kepada Pelaku Usaha Retail dan Perhotelan dalam pemasaran produk

Samarinda, 31 Januari 2025
 Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda


NURRAHMANI, S.IP. MM
 NIP. 196903011990032003

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome / Output	Satuan	Rumus / Persamaan	Target 2024				
				Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTMUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	54,05	15,00	20,00	30,00	35,00
			Jumlah pelaku usaha di wilayah kota samarinda		185	185	185	185
			Hasil Presentase		8,11	10,81	16,22	18,92
1	Presentase Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan Pengertian sesuai Permendag no.23 Tahun 2021	%	Jumlah izin (Rekomendasi) pusat Perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 Hari Kerja	100	25	25	25	25
			Jumlah Pemohonan izin (Rekomendasi) pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar					
			Hasil Presentase					
		%	Jumlah izin (Rekomendasi) pusat Toko Swalayan yang diterbitkan ≤ 5 Hari Kerja	100	25	25	25	25
			Jumlah Pemohonan izin (Rekomendasi) Toko Swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar					
			Hasil Presentase					
	2 Presentase TDG	%	Jumlah Penerbitan (Rekomendasi) TDG ≤ 5 Hari Kerja	100	25	25	25	25
			Jumlah permohonan penerbitan (Rekomendasi) TDG					
			Hasil Presentase					
3	Presentase Gudang yang Tidak Mempunyai TDG	%	Jumlah Penerbitan TDG	59,54	10	10	10	9
			Jumlah gudang yang ada di kota samarinda		131	131	131	131
			Hasil Presentase		7,63	7,63	7,63	6,87
4	Presentase Pengembangan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	$X = \frac{(a+b)}{c} \times 100\%$	15	0	0	0	15
			a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)		0	0	0	7,5
			b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)		0	0	0	7,5
5	Presentase koefisien variasi harga antar waktu	%	Presentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	<10	0	0	0	10
2	Presentase kinerja pupuk (Urea dan NPK)	%	Realisasi	70	0	0	0	70
			RDKK					
			Hasil Presentase					
6	Presentase Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	%	$X = \frac{a}{b \times c} \times 100$	75	0	0	0	75
			a = Jumlah pupuk yang disalurkan					
			b = Target komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KPP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK)					
			c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)					
3	Presentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	%	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	54,03	0	0	0	54,03
			Jumlah Potensi UTTP yang wajib di tera dan tera ulang					
			Hasil Presentase					
7	Presentase alat - alat UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun berjalan	%	Jumlah UTTP yang di Tera / Tera ulang pada tahun berjalan	51,44	200,00	2000,00	2200,00	1248,00
			Jumlah Potensi UTTP yang wajib di tera dan tera ulang		10980	10980	10980	10980
			Hasil Presentase		1,82	18,21	20,04	11,37
8	Presentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	Jumlah Sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	75				75
			Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan					
			Hasil Presentase					

CASCADE/PENJENJANGAN KINERJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

[illegible]

Sasaran Daerah	Sasaran Strategis RENSTRA PD (Rak JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA)	Strategi	ARAH KEBIAKIHAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (BU JABATAN ADMINISTRATOR)	JABATAN ADMINISTRATOR	TARGET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (BU JABATAN PENGAWAS/SUBKOR/ ETUA TIM)	JABATAN PENGAWAS/SUBKOR/ DIREKTURIA TIM	TARGET 2025	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN (BU JABATAN PENGAWAS/SUBKOR/KETUA TIM / PPTK)	JABATAN PENGAWAS/SU BKOR/KETUA TIM / PPTK	TARGET 2025	KI #1 / PELAKSANA	TARGET 2025
Tujuan 2025 : 0,3 %	Tujuan 2025 : 17,47%		Peredaran Minuman Beralkohol, BOKT, Tera Ulang UTTP, Pupuk Bersih dan Sarang Bersih dalam rangka meningkatkan pengamanan perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PELUMBAHAN	Persentase paku uata yang memperoleh izin baru dengan nomor UTTP-GLP Pusi peredaran dan UTTP/UTSP Tera Bersih	Kantor Baling Perdagangan Dalam negeri	94.05	Kegiatan Penertiban Surat Sin Uata - Perdagangan Minuman Beralkohol, Sarang B dan C serta Pengesah dan Pungsi - Langkang Minum di Tempat	Jumlah Rekomendasi Penemuan Beralkohol, Perdagangan Ica Hiral Sarang B dan C	Ketua Tim Paksi Disribusi	18	Penelitian Penertiban Surat Sin Uata - Perdagangan Minuman Beralkohol, Sarang B dan C	Jumlah Surat Ica Uata Perdagangan Minuman Beralkohol, Sarang B dan C yang diterbitkan, tidak dalam Perdagangan Minuman Beralkohol, Sarang B dan C	Ketua Tim Paksi Disribusi	18	Laporan monitoring terapan Rukun perikanan	18 Laporan
				PROGRAM STANDARISASI DAN PENJAJANGAN KUALITAS	Persentase alat - alat UTTP perantara tera sah yang tera sah		94.09	Kegiatan Publikasi dan Monitoring Legal, Sarang Tera, Tera Uata, dan Pengawasan	Persentase alat - alat UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun berjalan	Kepala UPT Monitoring	51,44%	Pelaksanaan Monitoring Legal, Sarang Tera, Tera Uata	Jumlah Alat Ukur, Alat Tera, Alat Timbang, dan Alat Pengukuran Daya Uata	Kepala UPT Monitoring	5448	JPT perantara Jumlah Alat UTTP yang ditera - Tera Uata	5448 Alat UTTP
									Persentase BOKT yang ditera sah pada tahun berjalan yang tera sah (Persentase No. 18/19, 20/20/21/21)	Ketua Tim Koordinasi dan Teru Naga	75%	Pengawasan Perdagangan Minuman Beralkohol, Sarang B dan C	Jumlah Paket Uata di Baling Perdagangan Legal yang ditera	Ketua Tim Koordinasi dan Teru Naga	1800	JPT Pengawasan Sarang Tera : Jumlah Paket Uata yang ditera	1800 Paket Uata



CROSSCUTTING DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

Sasaran Daerah	SASARAN STRATEGIS RENSTRA PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI	STAKEHOLDER	FASILITASI LINTAS STAKEHOLDER	
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik	Peningkatan Aktivitas Perdagangan Luar Negeri dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan	Disperindagkop Kaltim,Bapperida, BPKAD, Inspektorat Serta OPD Terkait	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen	
					Penyediaan Gaji, Tunjangan serta pelaporan keuangan	Bapperida, BPKAD, Inspektorat	Penyediaan Anggaran dan Pelaporan	
					Pelaporan Retribusi Daerah	Bapperida, Bapenda, BPKAD, Inspektorat	Pelaporan Retribusi Daerah Bidang perdagangan	
					Penyediaan Jasa pelayanan umum	Bapperida, BPKAD, Inspektorat	Penyediaan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Bapperida, BPKAD, Inspektorat	Penyediaan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan	
MENINGKATNYA PEMBANGUNAN SEKTOR TERSIER	MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS PERDAGANGAN DALAM NEGERI		Penciptaan pasar dan kemitraan serta promosi terhadap pelaku usaha / UMKM Kota Samarinda dalam rangka menciptakan komoditi unggulan untuk konsumsi dalam negeri hingga Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pameran Dagang nasional	UMKM Kota Samarinda	Produk yang di Promosikan	
						BP2TSP Kota Samarinda	Fasilitasi Stand dan Dekorasi	
						Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Samarinda	Dekranasda dan pelaku IKM	
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Business matching (Penciptaan pasar)	Pelaku Usaha retail Kota Samarinda	Kurasi dan Pemasaran Produk	
						BPBJ Setkot Samarinda	Fasilitasi E Catalog	
			Pembangunan dan Revitalisasi serta optimalisasi sarana dan prasarana perdagangan kearah modern dan ber SNI	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Promosi	Diskominfo Kota Samarinda	Fasilitasi E Commerce	
						UMKM Kota Samarinda	Produk yang di Promosikan	
						BP2TSP Kota samarinda	Perizinan Pelaku Usaha	
						Dinas PUPR Kota samarinda	Pembangunan dan Tenaga teknis	
						Kementrian Perdagangan RI, UPT BPSMB Prov Kaltim, BPOM Kota Samarinda, Labkesda Provinsi Kaltim dan Forkot Samarinda	Pendampingan serta pemenuhan Persyaratan menuju SNI Pasar	
Indikator Tujuan	Indikator Sesaran			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Menuju SNI	Kodim 0901 , Polresta , Sekretariat, Bapperida , Satpol PP, Bagian Hukum , Unsur Kecamatan dan kelurahan Kota Samarinda	Tim penyalpan, Pelaksanaan dan pemantauan Relokasi Pedagang Pasar pagi	
						Satpol PP dan Dishub Kota samarinda	Pengawasan Opeasional Pasar Rakyat Terutama pasar Segiri	
Target 2025 8,30%	Target 2025 17,47% (Sumber data BPS)		Pengembangan jaringan distribusi yang efektif, operasi pasar ,serta pengawasan terhadap Peredaran Minuman Beralkohol, BDKT, Tera Ulang UTPP, Pupuk Bersubsidi dan Barang Berbahaya dalam rangka meningkatkan pengamanan perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengawasan Bapokting	Kodim 0901 Samarinda, Satgas Pangan Polri , Dinas Ketapangtani dan Bagian Ekonomi Kota Samarinda	Pengawasan Gejalaok harga	
					Pasar Murah Reguler	Diskumi Kota Samarinda, Bulog, Retail dan Perumda Varia Niaga Kota Samarinda	Penyediaan Produk Pasar Murah	
					Operasi Pasar	Bulog Samarinda	Penyediaan komoditi Operasi pasar	
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Dinas Ketapangtani Samarinda, Distributor Pupuk (PPI) dan Kios Tani	Data RDKK, Alokasi dan Penyaluran Pupuk bersubsidi	
					Pengawasan Peredaran M inol	BP2TSP, Satpol PP, Bagian Hukum Sekretariat , BPOM Kota Samarinda	Tim Terpadu Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	
				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Sidang Tera - Tera Ulang	Pengelola dan Pihak Keamanan Pasar	Mengawal Sidang Tera - Tera Ulang	
					Pengawasan dan Penyuluhan Kametrologian	Pelaku Usaha	Membantu Pengawasan terhadap BDKT	

